

TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
 Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
 E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

Hotline/SMS : 081317575066
 e-mail : redaksi@sinartani.co.id

Edisi 19 - 25 Februari 2025

No. 4075
 Tahun LV

www.tabloidsinartani.com

www.sinartani.co.id



8 Bambang Soga, Ketua PATRI:
 "Jangan Malu jadi Anak Transmigrasi"

10 Babak Baru Serapan Gabah

14 Optimis, Produksi Padi Meningkat

TIGA REGULASI

PENYOKONG SWASEMBADA

www.sinartani.co.id |
 [tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com) |
 [@SinarTaniST](https://twitter.com/SinarTaniST) |
 [tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani) |
 [SINTA TV](https://www.youtube.com/SINTA_TV)



ADV JAGO

Hasil Tinggi
Toleran Bulai



ADV MONTOK

Toleran Bulai
Rendemen Tinggi

[@advantaseedsid](https://www.instagram.com/advantaseedsid) |
 [Advanta Seeds Indonesia](https://www.facebook.com/AdvantaSeedsIndonesia) |
 [Advanta Seeds Indonesia](https://www.linkedin.com/company/AdvantaSeedsIndonesia) |
 [Advanta Seeds Indonesia](https://www.youtube.com/AdvantaSeedsIndonesia)



EDITORIAL

Regulasi Baru Prabowo

Salam sehat bagi Sahabat Tabloid Sinar Tani.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto kerap melontarkan ungkapan percepatan swasembada pangan (beras). Upaya mencapai target kecukupan pangan memang bukan persoalan mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu political will pemerintah.

Artinya, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat menyokong pencapaian target tersebut. Menjelang akhir Januari 2025, Presiden Prabowo akhirnya menerbitkan kebijakan yang terkait dengan pertanian. Tiga beleid baru tersebut yakni, Perpres mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Inpres Irigasi Pertanian dan Inpres Penyuluhan Pertanian.

Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran. Selama ini memang petani kerap mengeluhkan keberadaan pupuk subsidi. Bukan soal harga, tapi ketepatan sampai ke petani.

Kedua, Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Dengan Inpres ini, pemerintah berharap adanya percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencakup saluran, bangunan, bangunan pelengkap, termasuk pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi dan drainase.

Ketiga, Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Dengan keluarnya Inpres tersebut penyuluh pertanian di daerah akan menjadi pegawai pusat. Sebelumnya penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Inpres tersebut menetapkan dalam waktu 1 tahun, seluruh penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipusatkan ke Kementerian Pertanian. Pengalihan penyuluh pertanian dari daerah ke pusat juga tak semudah dibayangkan, bukan sekadar soal ketenagakerjaan penyuluh, tapi juga persoalan kelembagaan dan penyelenggaraannya.

Tiga regulasi baru tersebut akan dikupas pada terbitan Tabloid Sinar Tani edisi kali ini. Penyuluh Pertanian dan petani, serta pelaku usaha pertanian perlu segera mengetahui apa saja isi dari regulasi tersebut. Pada Laporan Utama atau Sorotan akan kami berikan QR Code-nya, sehingga sahabat Sinar Tani bisa mengunduh regulasinya.

Informasi lain yang Tabloid Sinar Tani sajikan minggu ini yang cukup menarik adalah mekanisme penyerapan gabah dan beras Perum Bulog tahun ini akan menjadi babak baru. Banyak perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan pemerintah yang diterbitkan Badan Pangan Nasional tidak lagi menggunakan standar kualitas gabah petani, seperti kadar air dan kadar hampa. Bahkan penyerapan gabah oleh Bulog yang ditargetkan sebanyak 3 juta ton setara beras tersebut akan dikawal Polri. Jumlah tersebut ditargetkan bisa terpenuhi pada April mendatang.

Isu soal pangan dalam pekan ini memang masih menarik untuk diulas. Selamat membaca.

SAUNG TANI



Presiden terbitkan tiga regulasi untuk percepatan swasembada pangan

- Ditunggu implementasinya ya pak..

BPS catat produksi padi tiga bulan pertama 2025 naik

- Semoga harga gabahnya tidak turun

Penyerapan gabah dikawal Polisi

- Kalau sampai salah kena semprit..



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Humas Kementan

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan** : Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi** : Yulianto; **Redaktur Pelaksana** : Yulianto; **Redaktur** : Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi** : Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden** : Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman** : Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi**: Hamdani; **Pengembangan Bisnis** : Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan**: Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi**: Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; **Komisaris**: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo

Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur**: Ir. Mulyono Machmur, MS

Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205

Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menper/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak**: Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga**: Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan**: **FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran**: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN**: 0852-8586; **Percetakan**: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Pentingnya
Meritokrasi dan
Antikorupsi

Kepada jajaran Kementerian Pertanian pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan kembali pentingnya bekerja dengan profesionalisme, menjunjung tinggi meritokrasi, dan menjauhi praktik korupsi. Dengan sistem meritokrasi, jabatan diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan, prestasi, dan kompetensi. Sehingga hal ini dapat memacu pegawai untuk memberikan kinerja terbaiknya.

Sekarang ini kita terapkan meritokrasi. Posisi dan jabatan yang diberikan kepada jajaran Kementerian Pertanian saat ini karena memang mereka layak di situ. Jadi, harus kerja dengan baik karena akan aku evaluasi terus.

Dengan sistem ini, kami akan menindak tegas siapa pun yang mencoba mendapatkan jabatan dengan cara yang menyimpang. Jadi saya meminta agar bekerja dengan baik, tidak perlu mencari keluarganya yang pejabat. Bagi yang titip menitip, kami akan memberikan teguran. Jika mencintai jabatanmu dan mencintai keluargamu, maka berkerjalah dengan baik.

Selain itu, kami juga mengingatkan seluruh pegawai Kementan agar menjunjung tinggi integritas dan menjauhi segala bentuk korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Kami juga meminta seluruh jajaran untuk turut melaporkan jika menemukan pelanggaran aturan. Untuk itu, jauhi korupsi. Laporkan kalau ada yang melakukan tindakan melanggar aturan. Bahkan kami akan bertindak tegas dengan melakukan pemecatan kalau ada yang korupsi.

Selain itu, kami berpesan agar seluruh jajaran Kementerian Pertanian siap bekerja keras dan bekerja di bawah tekanan dalam menjalankan program swasembada pangan. Kerja keras dan dedikasi sangat diperlukan untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih maju.

Ini negara yang memanggil. Berlian lahir dari tekanan yang keras. Memang begitu kita melatih orang untuk mengeluarkan kinerja terbaiknya. Pertanian terhormat dan negara terhormat di tangan kalian.

Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi pencapaian ini sebagai bukti nyata efektivitas berbagai program strategis yang dijalankan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi beras ini menunjukkan keberhasilan langkah-langkah strategis Kementerian Pertanian dalam mendorong produktivitas. Kami akan terus bekerja keras memastikan ketersediaan pangan nasional terjaga dengan baik.

Seperti kita ketahui, Badan Pusat Statistik dalam melaporkan lonjakan signifikan dalam produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras diperkirakan mencapai 8,67 juta ton, meningkat tajam sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.

Peningkatan ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta ha. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu ha atau 52,08% dibandingkan dengan luas panen pada Januari-Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta ha.



PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Durian Berkualitas, Industri Pangan Kuat



Korporasi kini jadi kunci utama meningkatkan kesejahteraan, membuka peluang baru di sektor usaha ternak. Dengan dukungan yang tepat, peternak bisa meraih keuntungan dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Durian berkualitas bukan sekadar buah lezat, tapi juga motor penggerak industri pangan yang berpotensi besar.

Keunggulannya tak hanya terletak pada rasa yang khas, tetapi juga pada peluang bisnis yang luas, kesejahteraan petani yang meningkat, dan kontribusinya dalam memperkuat perekonomian.

Dengan kualitas yang terjaga, durian dapat menjadi komoditas unggulan bernilai tinggi, baik di pasar lokal maupun internasional.

Indonesia sendiri memiliki banyak daerah penghasil durian terkenal, dengan musim panen utama yang berlangsung antara Juni hingga Agustus, serta musim kedua pada Desember hingga Februari.

Setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing dalam menghasilkan durian berkualitas.

Misalnya, Durian Medan dikenal dengan aroma khas dan rasa legitnya yang menggoda, sementara durian dari Kalimantan memiliki daging yang lembut dan tebal.

Di Jawa Barat, Durian Matahari menjadi primadona karena rasanya yang manis mendominasi, sedangkan Banyuwangi menawarkan sesuatu yang unik dengan durian merahnya yang eksotis.

Ketika musim panen tiba, durian pun mudah ditemukan di berbagai tempat—mulai dari pasar tradisional, pedagang kaki lima, hingga pusat kuliner.

Tak hanya dinikmati secara langsung, durian juga diolah menjadi beragam produk seperti es krim, pancake, dodol, hingga kopi durian

yang semakin digemari masyarakat.

Olahan-olahan ini tak hanya memperpanjang umur simpan durian, tetapi juga meningkatkan nilai ekonominya, menjadikannya lebih dari sekadar buah, melainkan sebuah peluang usaha yang menjanjikan.

Ciri-Ciri Durian Berkualitas

Memilih durian yang tepat membutuhkan ketelitian. Durian yang matang sempurna memiliki aroma kuat, bentuk bulat dengan daging lebih banyak, serta tekstur yang lembut dan padat.

Ketika diketuk, suaranya terdengar dalam dan berongga, menandakan isi yang tebal. Tangkai durian yang kasar dan kecoklatan menunjukkan bahwa buah tersebut jatuh alami dari pohon, yang berarti sudah matang dengan sempurna.

Selain itu, warna durian juga menjadi indikator kualitas. Kulit durian yang hijau kecoklatan menunjukkan kematangan ideal, sementara duri yang panjang dan rapat sering kali menandakan daging yang lembut dan tidak kering.

Durian berkualitas juga memiliki kadar air yang seimbang, tidak terlalu berair tetapi juga tidak terlalu kering.

Indonesia memiliki beragam varietas durian unggulan dengan karakteristik yang unik. Musang King terkenal dengan daging kuning keemasan dan kombinasi rasa manis serta pahit yang khas.

Montong, varietas asal Thailand yang juga populer di Indonesia,

memiliki ukuran besar, daging tebal, dan rasa manis yang kuat.

Durian Bawor dari Banyumas menawarkan perpaduan rasa legit dan sedikit pahit yang disukai banyak pecinta durian.

Sementara itu, Durian Merah dari Banyuwangi menjadi daya tarik tersendiri dengan warna merah mencolok dan cita rasa yang lebih manis dibandingkan varietas lain.

Tak ketinggalan, durian lokal seperti Petruk dari Jepara dan Tembaga dari Sumatera juga memiliki keunikan tersendiri dan semakin dikenal di pasar internasional.

Membangun Industri Durian

Industri durian yang kuat membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, mulai dari budidaya hingga pemasaran.

Penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik, pemilihan bibit unggul, serta cara panen dan penyimpanan yang tepat dapat meningkatkan kualitas durian yang dihasilkan.

Dengan pengelolaan yang profesional, petani dapat

memperoleh harga jual yang lebih tinggi dan produk durian Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, inovasi dalam pengolahan durian perlu terus dikembangkan agar nilai tambahnya semakin meningkat.

Produk olahan seperti durian beku, pasta durian, dan berbagai camilan berbasis durian dapat memperluas pasar dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dukungan pemerintah dan pelaku industri dalam hal regulasi, promosi, serta riset dan pengembangan akan semakin memperkuat posisi durian sebagai komoditas unggulan yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penulis: Lilik Winarti

Penyuluh Pusat (disarikan dari berbagai sumber)



CATATAN
Bejawan

Perubahan Iklim Pangkas Produksi Kakao

Dampak Perubahan iklim terhadap beberapa negara produsen kakao di Afrika yang menimbulkan berbagai persoalan antara lain penurunan produksi. Studi oleh Wageningen University & Research (WUR) perubahan iklim mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap produksi kakao di Afrika Barat dan Tengah. Negara tersebut merupakan produsen dari 70% kakao global.

Perubahan suhu dan curah hujan membuat beberapa daerah kurang cocok untuk budidaya kakao, sementara daerah lain mungkin mendapat manfaat dari perubahan iklim. Peneliti menggunakan permodelan komputer untuk mensimulasikan dampak perubahan iklim pada tahun 2060 di empat negara: Pantai Gading, Ghana, Nigeria, dan Kamerun.

Di Pantai Gading, hingga 50% wilayah penanaman kakao saat ini bisa hilang, sehingga mengurangi produksi secara signifikan. Ghana diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah lahan yang cukup besar, sementara Nigeria dan Kamerun mungkin akan mengalami peningkatan lahan subur untuk

kakao. Produksi Kamerun bisa meningkat sebesar 60%, dan Nigeria sekitar 40%.

Pergeseran ini mungkin mendorong pertanian kakao ke wilayah yang sebelumnya belum tersentuh, sehingga meningkatkan risiko deforestasi. Mengatasi dampak perubahan iklim terhadap kakao memerlukan pendekatan menyeluruh pada setiap tahap rantai pasokan. Petani menghadapi penurunan hasil panen, dunia usaha menghadapi peningkatan biaya, dan konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi.

Penting untuk membantu wilayah produksi saat ini beradaptasi dan mempertahankan produksi pada tingkat yang sama untuk mencegah deforestasi terkait kakao di tempat lain. Selain itu, memastikan kebijakan bebas deforestasi, seperti undang-undang Uni Eropa EUDR memberikan hasil yang berarti.

Bagi banyak petani di Afrika Barat, yang sudah menghadapi pendapatan rendah dan terbatasnya akses terhadap sumber daya, perubahan iklim dapat menimbulkan dampak yang besar. Untuk mengimbangi dampak negatifnya, sangat penting untuk meningkatkan hasil panen per hektar.

Terdapat potensi perbaikan yang signifikan, karena tingkat produksi saat ini jauh di bawah potensinya. Pengelolaan tanah yang lebih baik dan pemupukan yang tepat sasaran dapat membantu menjembatani kesenjangan ini.

Agroforestri yakni pohon kakao ditanam berdampingan dengan pohon lain, juga menjanjikan. Pohon peneduh dapat menurunkan suhu, menstabilkan kelembapan, dan menyediakan produk tambahan, sehingga mendiversifikasi pendapatan petani. Mengembangkan varietas kakao yang tahan panas dan kekeringan serta memberikan pelatihan bagi petani juga dapat membantu mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi.

Penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap produksi kakao di Afrika Barat dan Tengah sedang berlangsung. Penelitian yang dilakukan saat ini sedang mengkaji sejauh mana Afrika Barat dapat memenuhi permintaan kakao yang terus meningkat sambil mematuhi peraturan EUDR.

Sumber: Wageningen University & Research

Tiga Regulasi Penyokong Swasembada

Presiden Prabowo Subianto akhirnya meneken tiga regulasi baru untuk menyokong percepatan swasembada pangan. Tiga beleid baru tersebut yakni, Perpres mengenai Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Inpres Irigasi Pertanian dan Inpres Penyuluhan Pertanian.

Sinyal yang sebelumnya terlontar dari Menko Pangan, Zulkifli Hasan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional, kini sudah terwujud. "Ada kabar gembira Instruksi Presiden (Inpres) terkait irigasi, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai harga komoditas, Perpres tentang pupuk bersubsidi, serta Perpres mengenai penyuluh pertanian telah ditandatangani oleh Presiden," tutur Zulhas saat jumpa pers, beberapa waktu lalu.

Perpres Tata Kelola Pupuk

Meski sebelumnya ada empat yang rencananya akan diterbitkan,

hingga kini Tabloid Sinar Tani baru mendapatkan tiga kebijakan yang pemerintah terbitkan dalam waktu hampir bersamaan. *Pertama*, Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan ketahanan pangan nasional.

Ada beberapa perubahan kebijakan dalam Perpres baru ini. Diantaranya, mengenai target penerima pupuk bersubsidi, tidak hanya untuk petani, tapi juga pembudidaya ikan. Jenis pupuknya juga selain Urea, ZA, SP-36 dan NPK, tapi juga pupuk organik. Selain itu, dalam distribusi, pupuk subsidi diberikan langsung ke petani atau titik serah berada di Gapoktan, Poktan dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan).

Bahkan Perpres ini juga menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Artinya, Pupuk bersubsidi akan mendapat pengawasan dari mulai sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi dan ketersediaan stok.

Guru Besar Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan, IPB University, Prof. Dr. A Faroby Falateha mengakui, kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi yang baru ini memiliki tujuan positif, namun pelaksanaannya

memerlukan kesiapan matang. Jadi meski konsepnya terlihat efisien dan tepat sasaran, kenyataannya Gapoktan harus menghadapi sejumlah tantangan besar.

Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), terbatasnya pendanaan, dan kurangnya infrastruktur untuk mengelola distribusi. "Kesiapan Gapoktan dalam menjalankan tugas baru sebagai penyalur pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada kapasitas internal yang mereka miliki," tuturnya.

Sebagai lembaga yang selama ini berfokus pada pengelolaan kelompok tani, menurutnya, Gapoktan perlu membangun sistem administrasi yang transparan dan efisien, termasuk pencatatan distribusi dan manajemen logistik. "Jika Gapoktan tidak dapat mengelola distribusi dengan baik, maka bisa terjadi kelangkaan pupuk, bahkan penyalahgunaan yang merugikan petani," ujar Prof. Faroby mengingatkan.

Inpres Irigasi dan Penyuluh

Kedua, Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Dengan Inpres ini, pemerintah ingin melakukan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencakup saluran, bangunan,

bangunan pelengkapannya, termasuk pintu air, tanggul, dam parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi dan drainase.

Setidaknya ada empat instruksi utama yang tercantum dalam Inpres ini, yang berfokus pada upaya peningkatan dan perbaikan sistem irigasi di berbagai daerah. Pertama, pembangunan jaringan irigasi baru yang akan memperluas cakupan area pertanian. Kedua, rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada untuk memastikan kelancarannya dalam mendistribusikan air secara merata.

Ketiga, pemeliharaan berkelanjutan terhadap sistem irigasi yang ada agar tetap berfungsi optimal sepanjang tahun. Keempat, peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki tim yang kompeten dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pengairan.

Inpres ini menginstruksikan tujuh kementerian yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan proyek percepatan irigasi. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, serta Menteri Dalam Negeri.

Ketiga, Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Dengan keluarnya Inpres tersebut penyuluh pertanian di daerah akan menjadi pegawai pusat. Seperti diketahui, sebelumnya penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Inpres tersebut menetapkan dalam waktu 1 tahun, seluruh penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipusatkan ke Kementerian Pertanian. Dengan adanya pengalihan penyuluh ke Kementan, diharapkan pengelolaan dan koordinasi antara penyuluh dapat lebih seragam dan fokus memberikan pendampingan ke petani sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi pertanian terbaru. **Yul**



Scan untuk mengetahui lebih tentang **Tiga Regulasi Penyokong Swasembada**



Perpres No. 6 Tahun 2025 Selesaikan Karut Marut Tata Kelola Pupuk Subsidi

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres yang ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk yang lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan ketahanan pangan nasional.

Pupuk menjadi sarana produksi pertanian penting bagi petani. Karena itu, pemerintah memberikan subsidi agar petani bisa mendapatkan penyubur tanaman tersebut dengan harga murah. Sayangnya, dalam prakteknya di lapangan, kerap terjadi penyimpangan dalam distribusinya, sehingga petani kerap mengeluh kekurangan pupuk subsidi.

Untuk menyelesaikan karut marut tata kelola pupuk subsidi, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 6 Tahun 2025. Regulasi ini diharapkan membawa perubahan besar dalam tata kelola pupuk bersubsidi, terutama dalam penyaluran pupuk agar sesuai 6 T yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerimanya.

Ada beberapa perbedaan signifikan dengan Perpres No. 15 Tahun 2011. Misalnya, penerima pupuk subsidi kali ini tidak hanya sektor pertanian, tapi juga sektor perikanan yakni para pembudidaya ikan. Jenis pupuk yang mendapat subsidi juga ditambah, tidak hanya jenis pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK, tapi juga pupuk organik.

Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi petani dan pembudidaya ikan untuk memperoleh pupuk organik dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan masuknya pupuk organik dalam daftar pupuk yang mendapat subsidi, harapan besar pun muncul di kalangan petani yang selama ini mengandalkan pupuk kimia.

Pupuk organik, yang lebih ramah lingkungan, diyakini dapat meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Siapa yang yang berhak mendapatkan pupuk subsidi? Perpres Nomor 6 Tahun 2025 menetapkan pupuk subsidi diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani, termasuk mereka yang berada dalam lembaga masyarakat desa hutan, serta pembudidaya ikan. Nantinya, Gapoktan, Poktan, Pokdakan, pengecer dan koperasi yang bergerak atau di bidang penyaluran pupuk menjadi titik serah pupuk bersubsidi.

Persyaratan mengenai titik serah tersebut nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebagai lokasi titik serah, nantinya Gapoktan, Pokdakan, atau pengecer bertanggung jawab terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dan pembudidaya ikan.

Jika titik serah pupuk subsidi belum memenuhi persyaratan, maka pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi masih dapat melalui distributor dan kios pengecer. Namun pemerintah membatasi maksimal enam bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku.



Peran BUMN Pupuk

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan, terutama dalam mendukung sektor pertanian dan perikanan. Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini dilakukan BUMN Pupuk berdasarkan penugasan menteri terkait.

Pasal 8 menegaskan bahwa BUMN Pupuk harus mengikuti alokasi yang ditetapkan menteri untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pengadaan pupuk dapat dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika BUMN Pupuk tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, maka pengadaan dari luar negeri bisa dipertimbangkan.

BUMN Pupuk juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap distribusi pupuk bersubsidi, memastikan distribusi berjalan dengan baik hingga titik serah, yang mencakup Gapoktan, Pokdakan, pengecer, serta koperasi yang berperan dalam penyaluran pupuk. Setelah itu, pihak-pihak tersebut bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk kepada petani dan pembudidaya ikan.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan pupuk bersubsidi ini adalah sistem informasi yang terintegrasi. Pada Pasal 14 (2) mengharuskan kementerian terkait untuk membangun sistem informasi yang mencakup pendataan penerima subsidi, perencanaan, penyaluran, penagihan, pembayaran, serta monitoring dan evaluasi.

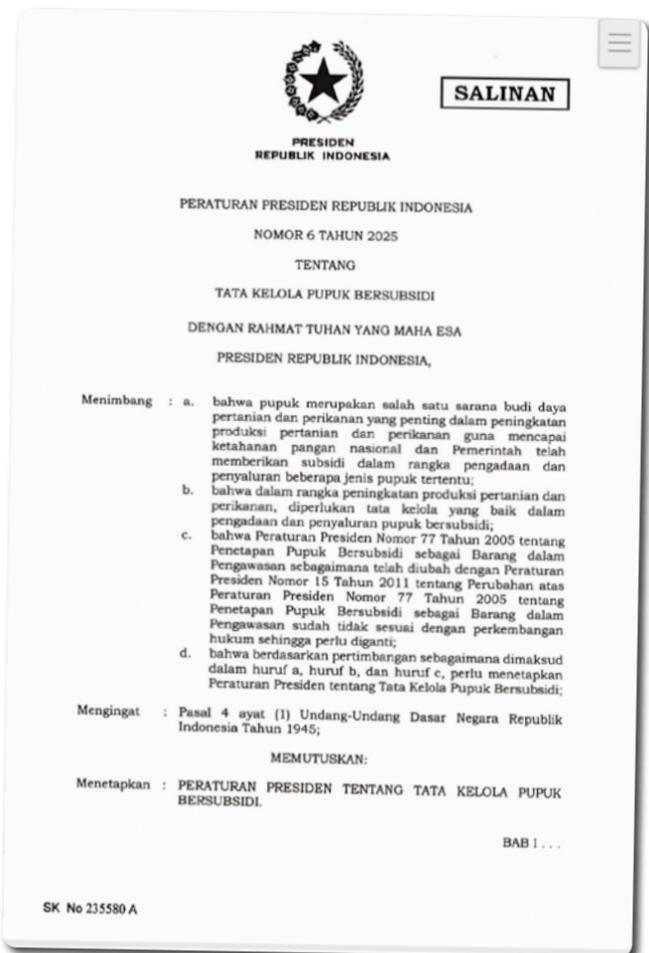
Sistem ini akan memastikan transparansi, efisiensi, dan

akuntabilitas dalam penyaluran pupuk. Selain itu juga akan memudahkan pendataan penerima subsidi, calon penerima dan calon lokasi untuk petani dan pembudidaya ikan. Dengan data tersebut, pemerintah akan mudah memverifikasi penerima pupuk subsidi. Kemudian bisa digunakan untuk perencanaan, penagihan dan sistem pembayaran, serta monitoring dan evaluasi.

Perpres ini juga menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasan Pupuk Bersubsidi meliputi pengawasan terhadap sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi dan ketersediaan stok. Pengawasan nantinya dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya telah mendorong penyederhanaan regulasi untuk mempermudah penyaluran pupuk. Selama ini penyaluran pupuk subsidi diatur dalam 147 peraturan. Selain itu untuk penyaluran pupuk subsidi harus ada persetujuan dari 12 Menteri, 38 Gubernur dan lebih dari 500 bupati/walikota.

Penyederhanaan regulasi ini didorong dalam bentuk Peraturan Presiden yang memungkinkan kebijakan penyaluran pupuk subsidi dilakukan secara lebih singkat. Dalam aturan baru tersebut, penentuan penyaluran pupuk ini hanya melibatkan tiga pihak, yakni Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau pengecer. **Gsh/Yul**



Inpres No. 2 Tahun 2025

Pastikan Air Mengalir ke Lahan Petani

Presiden Prabowo baru saja meneken Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Inpres ditandatangani 30 Januari 2025 tersebut menjadi langkah strategis memastikan ketahanan pangan dengan pengelolaan irigasi yang lebih efisien dan optimal.

Air memang menjadi faktor utama dalam usaha tani. Sayangnya, saat ini banyak jaringan irigasi yang rusak. Akibatnya, air pun tak bisa mengalir lancar ke lahan petani. Dampaknya, petani kadang hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi lahannya, meski di lahannya berada di areal irigasi.

Setidaknya ada empat instruksi utama yang tercantum dalam Inpres ini, yang berfokus pada upaya peningkatan dan perbaikan sistem irigasi di berbagai daerah. Pertama, pembangunan jaringan irigasi baru yang akan memperluas cakupan area pertanian.

Kedua, rehabilitasi infrastruktur irigasi yang sudah ada untuk memastikan kelancarannya dalam mendistribusikan air secara merata. Ketiga, pemeliharaan berkelanjutan terhadap sistem irigasi yang ada agar tetap berfungsi optimal sepanjang tahun.

Keempat, peningkatan kapasitas pengelolaan irigasi di tingkat daerah untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki tim yang kompeten dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pengairan.

Inpres ini juga menginstruksikan tujuh kementerian yang memiliki peran kunci dalam pelaksanaan proyek percepatan irigasi. Yakni, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Para Gubernur, dan Para Bupati/Wali Kota.

Masing-masing kementerian memiliki tugas yang berbeda, namun saling berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan program ini. Selain kementerian, Inpres ini juga melibatkan gubernur dan bupati/wali kota dari daerah yang memiliki proyek pengelolaan irigasi.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan setiap daerah dapat merasakan dampak positif dari perbaikan sistem irigasi tersebut. Pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk menyediakan anggaran yang diperlukan serta mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan lokal.

Instruksi ke Kementan

Apa instruksi ke Kementerian Pertanian? Dari banyak delapan point instruksi dalam Inpres No. 2 Tahun 2025 tersebut, Kementerian Pertanian diminta merumuskan kriteria pemilihan dan menyusun indikasi lokasi dalam kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Selain itu, verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan lokasi, serta menetapkan daftar kegiatan percepatan rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Juga memastikan tidak ada tumpang tindih kegiatan dengan kegiatan

yang dilaksanakan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lainnya.

Bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan pedoman percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, mengidentifikasi kegiatan percepatan pembangunan, merumuskan kriteria pemilihan dan menyusun indikasi lokasi dalam kegiatan percepatan pembangunan irigasi, serta memverifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan lokasi dalam kegiatan.

Kementerian Pekerjaan Umum juga diinstruksikan untuk mengintegrasikan kebutuhan dan perencanaan kebutuhan anggaran pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pendanaan sendiri akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari hasil pembangunan irigasi ini, Kementerian Keuangan akan memfasilitasi untuk percepatan pelaksanaan proses hibah hasil kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dari Menteri Pekerjaan Umum bersama Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dan alih status dari Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Pertanian.

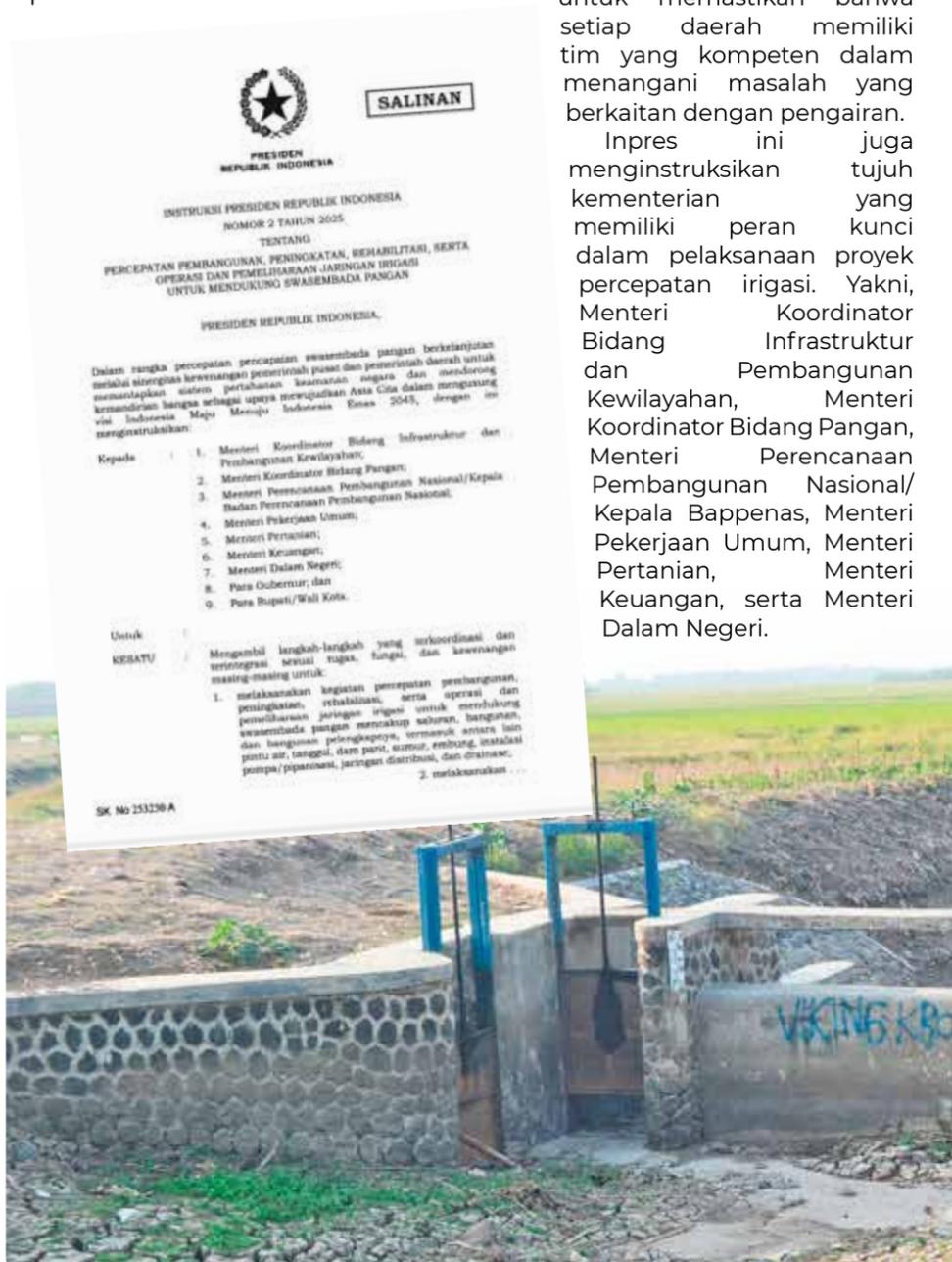
Bagi Pemerintah Daerah perlu diingat, regulasi ini menginstruksikan untuk menyediakan dukungan lahan siap bangun, area kerja, dan akses jalan dalam pelaksanaan kegiatan. Pemda juga diminta untuk melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Dengan adanya perbaikan irigasi, harapannya memang air bisa mengalir dengan baik ke lahan petani, sehingga berdampak pada usaha tani. **Gsh/Yul**

Langkah Segera untuk Kementerian dan Pemda

Kepada Kementerian dan Pemda, Inpres ini meminta agar mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

1. Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mencakup berbagai elemen penting seperti saluran air, pintu air, tanggul, dam, dan instalasi lainnya yang mendukung distribusi air untuk pertanian. Pembangunan dan pemeliharaan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan ketahanan air yang sangat penting bagi kelancaran proses pertanian di seluruh Indonesia.
2. Perluasan area irigasi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas irigasi. Sebanyak 14 provinsi yang memiliki potensi besar untuk pengembangan irigasi, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Jambi, serta beberapa wilayah di Kalimantan dan Papua Selatan, akan menjadi prioritas utama. Perluasan area ini diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian di daerah-daerah yang sebelumnya terkendala oleh minimnya akses terhadap irigasi.
3. Perencanaan dan penganggaran yang matang untuk setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kinerja sistem irigasi. Setiap kementerian dan pihak terkait diminta untuk merencanakan, menganggarkan, serta memantau pelaksanaan kegiatan dengan ketat. Evaluasi dan kontrol yang terstruktur menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa semua program irigasi dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
4. Tantangan dalam pelaksanaan proyek irigasi juga menjadi perhatian utama. Setiap pihak yang terlibat diminta untuk mampu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Ini bertujuan agar proyek irigasi dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di seluruh wilayah yang terlibat.



Inpres No. 3 Tahun 2025

Asa Besar Ketika Penyuluh Kembali ke Pusat

Presiden Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan. Dengan keluarnya Inpres tersebut penyuluh pertanian di daerah akan menjadi pegawai pusat.

Presiden Prabowo Subianto, dalam komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat sektor pertanian Indonesia, telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat proses swasembada pangan dengan menata ulang struktur penyuluhan pertanian di Indonesia.

Sebelumnya, penyuluh pertanian yang tersebar di berbagai daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Melalui kebijakan ini, seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) akan ditarik langsung ke Kementerian Pertanian untuk lebih memperkuat upaya mempercepat swasembada pangan.

Dengan adanya pengalihan penyuluh ke Kementan, diharapkan pengelolaan dan koordinasi antara penyuluh dapat lebih seragam dan dapat fokus dalam memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi pertanian terbaru. Petani juga akan mendapatkan lebih banyak akses pendampingan yang berkualitas, modal yang lebih mudah diakses, dan berbagai teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil produksi.

Dengan Inpres ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, seperti rendahnya produktivitas, ketidakmerataan distribusi hasil pertanian, dan keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan pasar. Dengan ditariknya PPL ke pusat, diharapkan juga tercipta sistem penyuluhan yang lebih efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Hal ini tentu akan berimplikasi pada peningkatan kualitas pendampingan kepada petani, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas pertanian secara nasional. Karena itu, kualitas penyuluh pertanian sangat mempengaruhi tingkat adopsi teknologi oleh petani serta kemampuan dalam menghadapi tantangan pertanian modern.

Sebelumnya, penyuluh pertanian tersebar di bawah otoritas pemerintah daerah, yang menyebabkan adanya perbedaan kebijakan dan regulasi di setiap daerah. Hal ini sering kali menimbulkan kendala dalam penyampaian informasi dan

pelayanan yang diberikan kepada petani.

Delapan Institusi

Untuk mewujudkan pendayagunaan penyuluh yang optimal, Inpres No. 3 Tahun 2025 menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak. Pasalnya, regulasi tersebut mengamanahkan ke delapan institusi yakni, Menko Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri PAN/RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dengan Inpres ini, masing-masing institusi mendapat tugas masing-masing. Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Pertanian diminta untuk segera melakukan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan serta penetapan langkah strategis dalam implementasi kebijakan ini.

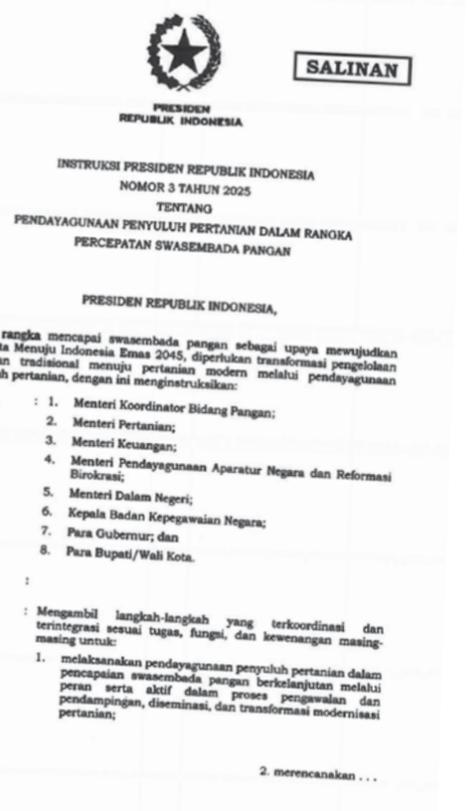
Bahkan Kementerian Pertanian diinstruksikan untuk mengambil alih seluruh PPL yang sebelumnya berada di bawah komando pemerintah daerah, agar mereka

langsung berada di bawah koordinasi Menteri Pertanian. Bahkan Presiden memberikan waktu pengalihan pegawai daerah ke pusat dalam jangka waktu 1 tahun.

Dalam proses pengalihan ini, tentunya dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama untuk memastikan transisi yang mulus tanpa mengganggu operasional pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kendala birokrasi yang selama ini menghambat kinerja penyuluh pertanian.

Meskipun pengalihan penyuluh ke Kementerian Pertanian, peran kepala daerah tetap sangat penting. Gubernur, bupati, dan wali kota diinstruksikan untuk memfasilitasi pengalihan status ASN PPL dari pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian. Selain itu, mereka juga diminta untuk memastikan bahwa fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di daerah tetap berjalan dengan baik, serta memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan petani dan ekonomi lokal.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penguatan kelembagaan petani juga akan memperkuat posisi tawar mereka dalam menghadapi tantangan pasar,



sehingga mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi.

Meskipun Inpres ini memiliki tujuan yang jelas, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya kesiapan infrastruktur yang mendukung kebijakan ini. Pengalihan penyuluh ke Kementan memerlukan perencanaan yang matang terkait dengan sistem administrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa penyuluh pertanian yang ada di lapangan benar-benar memiliki kompetensi yang memadai. Pelatihan dan pengembangan kapasitas penyuluh harus terus dilakukan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa dukungan yang kuat dalam hal pelatihan, kebijakan ini berpotensi tidak memberikan hasil yang maksimal. **Gsh/Yul**

Amanat untuk Kementerian Pertanian

Inpres ini memberikan arahan yang jelas kepada Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-konkret dalam pendayagunaan penyuluh pertanian. Beberapa kebijakan utama yang disorot dalam Inpres ini.

No	Amanah	Penjelasan
1	Pengalihan Penyuluh ke Kementerian Pertanian	Dalam waktu 1 tahun, seluruh penyuluh pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipusatkan ke Kementerian Pertanian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan profesionalisme dalam sistem penyuluhan.
2	Penguatan Peran Penyuluh dalam Swasembada Pangan	Penyuluh akan lebih aktif dalam mendampingi petani untuk mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan. Mereka akan berperan langsung dalam pengawalan setiap langkah produksi pertanian.
3	Pengembangan Kelembagaan Petani	Penyuluh juga bertugas untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani sehingga mereka memiliki akses lebih baik terhadap teknologi, modal, dan pasar.
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pemerintah menyediakan sarpras yang dibutuhkan oleh penyuluh agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Termasuk fasilitas pelatihan dan alat-alat pertanian modern yang lebih efisien.
5	Data dan Informasi Penyuluhan:	Dalam rangka memastikan efektivitas program penyuluhan, pemerintah akan membangun pangkalan data dan sistem informasi pertanian yang dapat diakses oleh penyuluh dan petani.
6	Evaluasi dan Pengawasan:	Kementerian Pertanian akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh, serta melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya untuk memastikan kebijakan pertanian berjalan sinergis.

Bambang Soga, Ketua PATRI: “Jangan Malu jadi Anak Transmigran”



Bambang Sulistiyo, atau yang akrab disapa Bambang Soga, resmi terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (Patri). Dalam kepemimpinannya, dirinya komitmen untuk mengangkat martabat anak transmigran dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sejak awal, transmigrasi digagas sebagai perekat bangsa yang menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Visi pendiri PATRI tersebut akan diwujudkan dengan berbagai misi yang akan dilakukannya.

Bambang menekankan, setidaknya ada dua misi utama PATRI dibawah kepemimpinannya. Pertama, menanamkan kebanggaan kepada generasi muda transmigran agar mereka tidak merasa malu dengan status mereka. “Menjadi anak transmigran bukanlah sesuatu yang memalukan. Transmigrasi hanyalah nasib awal, tetapi ke mana kita membawa nasib itu, ke arah baik atau buruk, adalah pilihan kita sendiri,” ujar Bambang.

Selama ini dirinya mengakui, masih ada stigma negatif terhadap anak transmigran yang harus diperbaiki. Karena itu, ia bertekad ingin membangun kesadaran bahwa mereka adalah bagian penting dalam perekat bangsa.

Untuk mencapai hal tersebut, dua hal utama yang menjadi fokusnya adalah membangun kebanggaan dan memperkuat fondasi ekonomi anak-anak transmigran. Namun kebanggaan sebagai anak transmigran harus diiringi dengan kemajuan ekonomi. “Jika komunitas transmigran tidak memiliki fondasi ekonomi yang kuat, kebanggaan tersebut akan sulit dipertahankan,” tuturnya.

Siap Ikut Andil

Sebagai organisasi berbasis petani dan nelayan, Bambang mengaku PATRI siap ikut andil dalam program ketahanan pangan dan swasembada yang dicanangkan pemerintah. “Kami hidup di daerah-daerah sulit. Jika potensi ini dimaksimalkan, bisa menjadi kekuatan besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.

Namun, Bambang juga mengkritisi kondisi saat ini yang mana

Indonesia masih mengandalkan impor pangan, meski berbagai program telah pemerintah canangkan selama puluhan tahun. Karena itu, ia menegaskan, pemerintah perlu mencari solusi konkret agar swasembada pangan benar-benar terwujud.

Sebagai organisasi yang memiliki pengalaman hidup di daerah terpencil, PATRI siap berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saat ini kata Bambang, PATRI memiliki tenaga kerja yang melimpah dan siap membantu program pemerintah.

Bahkan, PATRI ingin aktif memberikan masukan kepada kementerian terkait agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. “Banyak kebijakan pangan yang dirancang tanpa mempertimbangkan pengalaman nyata di lapangan. Kami ingin menjadi mitra pemerintah dalam memberikan solusi yang lebih efektif,” tambahnya.

Bahkan Bambang mendukung penuh program Astacita, yang berfokus pada pembangunan dari pinggiran untuk memperkuat ekonomi nasional. Ia melihat program ini sangat relevan dengan kondisi para transmigran, yang mayoritas tinggal di daerah terpencil dan pinggiran.

“Dulu, PATRI bermula dari hutan yang tak berpenghuni, tanpa akses jalan, dan dianggap sebagai daerah buangan. Kini, dengan program pembangunan dari pinggiran, kesenjangan antara desa dan kota bisa diperkecil. Tapi, tentu saja, ini harus disertai dengan aksi nyata, bukan sekadar cita-cita,” tuturnya.

Sebagai anak transmigrasi, Bambang mengaku prihatin terhadap nasib petani di daerah transmigrasi. Ia mencontohkan bagaimana sulitnya petani di daerah terpencil menjual hasil panen karena minimnya infrastruktur.

“Pernah satu kampung menanam semangka, tetapi karena tidak ada akses jalan, ribuan ton

semangka membusuk di kebun. Infrastruktur yang buruk menjadi masalah utama yang harus segera dibenahi,” katanya. Karena itu, menurut Bambang, pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan program ketahanan pangan agar hasil panen tidak terbuang sia-sia.

Teruji di Daerah Terpencil

Selain memperjuangkan kesejahteraan petani dan nelayan transmigran, PATRI juga berencana untuk segera melakukan audiensi dengan kementerian terkait. Bambang ingin memastikan bahwa aspirasi dan pengalaman masyarakat transmigran yang telah puluhan tahun hidup di daerah terpencil dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah.

“Kami ingin kebijakan pangan tidak hanya didasarkan pada teori akademisi yang belum pernah turun langsung ke lumpur. Kami yang hidup di daerah ini tahu betul bagaimana cara mengelola lahan, termasuk lahan gambut yang selama ini dianggap sulit untuk pertanian,” ungkapnya.

Bambang mengatakan, para transmigran yang sudah bertahun-tahun tinggal di lokasi tersebut lebih memahami bagaimana

menghadapi medan yang sulit. Karena itu, ia berharap pemerintah seharusnya lebih banyak melibatkan komunitas transmigran sebagai mitra strategis, khususnya dalam membangun pertanian di daerah.

Ke depan dirinya berharap bahwa peran PATRI dalam pembangunan nasional semakin diperhitungkan. Dengan pengalaman bertahun-tahun di daerah terpencil, komunitas transmigran memiliki keunggulan dalam mengelola lahan dan menghadapi tantangan di sektor pertanian dan perikanan.

“Kami sudah berjuang dari nol, dari daerah yang sebelumnya tak berpenghuni hingga bisa menjadi desa yang berkembang. Itu bukti keuletan kami. Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tutur warga transmigran asal Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ini.

Dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Bambang Sulistiyo, PATRI siap mengangkat martabat anak transmigran dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kini, tinggal bagaimana pemerintah merespons dan berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita besar ini.

Herman/Yul

Lahan Terbatas, Arif jadi Petani Melonial di Atap Rumah

Di tengah padatnya ibu kota, Ahmad Syarif yang akrab disapa Arif membuktikan bahwa berkebun tak harus memiliki lahan luas. Berawal dari hobi dan profesinya sebagai penyuluh pertanian, Arif mendirikan "Latar Babe", yang merupakan singkatan "Lahan Terbatas Bawa Berkah".



Berlokasi di rooftop rumahnya di Kelurahan Cipadak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Latar Babe kini berkembang menjadi pusat urban farming yang menarik perhatian masyarakat dan berbagai kalangan, mulai dari pecinta tanaman hingga pejabat pemerintahan kota DKI Jakarta.

Tinggal di Jakarta Selatan, Arif justru bertugas sebagai penyuluh pertanian THL-TBPP di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Namun, dirinya merasa perlu memiliki lahan praktik sendiri. Saat ini, Latar Babe memiliki lahan 150 meter persegi yang ditanamin melon dengan sistem hidroponik dan 60 meter persegi untuk tabulampot buah.

Dengan latar belakang alumni Sekolah Menengah Pembangunan Pertanian Jagakarsa (kini SMKN 63), Arif memang telah memiliki dasar ilmu budidaya tanaman yang dipelajari saat sekolah. Namun ia tetap memperdalam pengetahuannya dengan mempelajari teknik bertani, terutama hidroponik, kemudian mengaplikasikan sendiri di lahannya di atasp rumah.

Arif melihat, masyarakat perkotaan membutuhkan solusi bercocok tanam yang mudah, murah, dan berkelanjutan. Tak sekadar mengajarkan teori, ia mendampingi mereka hingga berhasil. Di Latar Babe, Arif menanam mulai dari tanaman hias, tabulampot (tanaman buah dalam pot), hingga yang paling menarik perhatian yaitu melon.

"Saya telah merasakan sendiri manisnya hasil panen, baik dari segi rasa maupun manfaat ekonomi," ungkapnya. Dengan terbatasnya ruang bertanam, Arif pun mengubah rooftop yang sebelumnya tidak dimanfaatkan menjadi lahan produktif yang

kini menjadi sumber penghasilan tambahan.

Satu tahun lalu, Arif mengajak para remaja sekitar untuk bertani di Latar Babe. Anak-anak muda yang sebelumnya menghabiskan waktu dengan bermain gawai hingga begadang, kini aktif menanam melon.

"Di awal, saya coba menanam empat pohon melon. Banyak yang suka, akhirnya saya tambah jadi 30 pohon, lalu berkembang menjadi 153 pohon. Setiap panen, permintaan semakin meningkat. Bahkan sebelum panen tiba, banyak yang sudah memesan lebih dulu," ujar Arif.

Melihat antusiasme masyarakat, Arif pun semakin serius menanam melon varietas Kirin, yang terkenal dengan kulit kuning keemasan, daging renyah, dan rasa manisnya yang khas. "Awalnya saya mencoba beberapa jenis melon sebelum akhirnya memutuskan bahwa varietas Kirin paling cocok ditanam" ungkapnya.

Petik, Timbang, Bayar

Arif memahami bahwa warga Jakartasenang dengan pengalaman unik dan Instagramable. Karena itu, ia menerapkan konsep "Petik, Timbang, Bayar". Jadi saat panen, pengunjung bisalangsung memetik melon sendiri, menimbang, lalu membayar sesuai beratnya.

Namun diakui, banyak yang datang untuk berfoto, membuat video, hingga membagikan pengalaman mereka di media sosial. Strategi pemasaran ini terbukti efektif menarik perhatian dan memperluas jangkauan pasar. "Awalnya ada yang ragu karena harga melonnya Rp50.000 per kg. Tapi setelah mereka coba sendiri, mereka memahami kualitasnya, dan akhirnya jadi pelanggan tetap," kata Arif.

Konsep ini sukses menarik minat banyak orang, termasuk pejabat

dan tokoh masyarakat. Latar Babe telah dikunjungi anggota DPRD, DPR RI, dan dalam waktu dekat. "Rencananya pada panen yang ke empat ini akan ada kunjungan dari Pemerintah DKI Jakarta," ujarnya saat berdialog dengan SINTATV.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa pertanian perkotaan memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Bahkan Arif tidak hanya berbisnis, tetapi juga berbagi ilmu. Bagi warga yang ingin mulai bertani di lahan terbatas, ia memberikan pembinaan dan pendampingan gratis.

"Bertani bukan soal "tangan panas atau tangan dingin", tapi soal mau belajar atau tidak. Saya selalu bilang, kalau belum tahu, cari ilmunya. Kalau belum mau, ya sulit untuk memulai. Yang penting ada niat dulu, lalu kita bisa mulai bertani," tuturnya.

Ajak Generasi Muda

Dalam mengelola Latar Babe, setidaknya ada 10 remaja yang aktif terlibat dalam kegiatan bertani dengan latar belakang yang bermacam-macam. Bahkan salah seorang pengelolanya adalah guru olah raga di salah satu sekolah SMP di wilayah Jagakarsa. "Ada yang kini kuliah di IPB, bahkan ada yang akan ikut Magang Jepang program Pemerintah," katanya.

Keaktifan generasi muda tersebut membuktikan bahwa usaha pertanian kota bisa memberikan peluang sebagai penghasilan. Karena itu, Arif berharap semakin banyak anak muda yang tertarik untuk bertani, baik untuk kebutuhan sendiri maupun sebagai peluang usaha.

Karena itu selain menjual hasil panen, Arif rutin mengadakan pelatihan gratis. Ia berharap semakin banyak orang yang mau bertani di rumah mereka sendiri. "Saya ingin anak-anak muda belajar dan menerapkan ilmu ini di rumah mereka. Tidak harus besar, yang penting mulai," katanya.

Dalam pelatihan ini, Arif mengajarkan teknik bercocok tanam yang sederhana, mulai dari memilih bibit, merawat tanaman, hingga panen yang optimal. Ia juga berbagi tips bagaimana memasarkan hasil panen, terutama dengan memanfaatkan media sosial agar lebih banyak orang yang tertarik membeli.

Arif juga menekankan bahwa urban farming bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan di kota-kota besar. Jika semakin banyak orang memanfaatkan lahan terbatas mereka untuk bertani, maka kebutuhan pangan lokal bisa lebih terpenuhi tanpa harus selalu bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Dengan semangat berbagi, kreativitas dalam memanfaatkan lahan terbatas, serta inovasi dalam pemasaran, Latar Babe tak hanya menjadi tempat bertani, tetapi juga sumber inspirasi bagi banyak orang. Banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk mengembangkan model serupa di lingkungan mereka sendiri.

Arif berharap semakin banyak orang yang terinspirasi untuk mulai bertani di rumah masing-masing. Dengan demikian, pertanian kota bisa berkembang lebih luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. **Herman/Yul**



Babak Baru Serapan Gabah

Penyerapan gabah dan beras Perum Bulog tahun ini menjadi babak baru. Banyak perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah yang diterbitkan Badan Pangan Nasional tidak lagi menggunakan standar kualitas gabah petani. Bahkan penyerapan gabah tersebut akan dikawal Polri.

Tok ! Pemerintah telah mengetok palu mekanisme penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog pada tahun ini. Angkanya sebanyak 3 juta ton setara beras. Jumlah tersebut memang naik cukup tinggi dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya 1,26 juta ton beras.

Dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 24 tahun 2025, pemerintah hanya menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500/kg. Namun dalam keputusan tersebut, pemerintah tidak menetapkan standar kualitas seperti kadar air (KA) maupun kadar hampa (KH). Padahal dalam kebijakan sebelumnya ditetapkan KA maksimal 25 persen dan KH maksimal 10 persen.

Pemerintah juga tidak lagi menetapkan HPP GKP di penggilingan padi dan Gabah Kering Giling (GKG) baik di penggilingan maupun di gudang Bulog. Begitu juga harga beras di gudang Perum Bulog. Untuk menjaga kualitas gabah yang dibeli, sebelumnya pemerintah juga menetapkan kebijakan rafaksi untuk GKP.

Dalam babak baru, penyerapan gabah kebijakan tersebut tidak ada lagi. Pemerintah hanya menetapkan satu harga yakni GKP di tingkat petani. Artinya, Perum Bulog 'wajib' membeli gabah dengan kualitas apapun di tingkat petani.

"Kita sudah sepakat sesuai perintah Presiden seluruh penggilingan siapa saja yang membeli gabah di tingkat petani mutlak dan wajib Rp6.500/kg," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam jumpa persnya di Gedung Kementerian Pertanian, Minggu (9/2).

Bahkan serapan sebanyak 3 juta ton setara beras tersebut sudah

harus dipenuhi selama tiga bulan ke depan yaitu Januari, Februari dan Maret. Saat penandatanganan komitmen penyerapan gabah, Senin (10/2), telah ditetapkan perusahaan penggilingan gabah akan memasok sebanyak 2,1 juta ton dan Bulog sebanyak 900 ribu ton setara beras.

Dengan jangka waktu yang pendek tersebut memang tak mudah bagi Perum Bulog dan perusahaan penggilingan bisa menyerap gabah petani dalam jumlah sebanyak itu. Namun Direktur Utama Bulog, Mayor Jenderal TNI, Novi Helmy Prasetya yang baru saja menggantikan Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya optimis mampu melakukan serapan gabah 3 juta ton setara beras dalam 3 bulan ke depan.

"Karena itu saya minta kerjasamanya di lapangan. Tidak ada kata lain apa yang menjadi sasaran kita dalam mewujudkan swasembada harus segera dilaksanakan dan Insyaallah 3 bulan ke depan target 3 juta ton optimis bisa kita capai," tuturnya. Sejauh ini, menurut Novi capaian serapan gabah sudah mencapai 45 ribu ton dari hasil serapan gabah panen raya. Bahkan angka tersebut akan terus bertambah seiring penyerapan di semua daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog menegaskan, pembelian gabah sesuai dengan HPP merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadi salah satu upaya mempercepat swasembada pangan.

Bahkan bagi Sudaryono serapan gabah sesuai HPP sangat penting dilakukan Bulog untuk memastikan stok pangan nasional tercukupi.

"Swasembada itu adalah prioritas dari Presiden yang harus mampu kita penuhi. Artinya stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera. Karena itu Presiden sudah memutuskan HPP nya Rp6.500 dan Bulog ditargetkan 3 juta," katanya.

Polri Turun ke Sawah

Untuk memastikan kelancaran penyerapan gabah, pihak kepolisian akan mengawal dan mendampingi proses penyerapan gabah guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif di lapangan. Kepala Bareskrim Polri, Komisar Jenderal Wahyu Widada, menegaskan komitmen Polri dalam mengawal percepatan swasembada pangan melalui pengawasan distribusi dan serapan gabah agar sesuai HPP.

Bahkan Polri juga siap menindak penggilingan padi yang melanggar aturan dan merugikan petani. "Polri sudah melaksanakan pemantauan dan menemukan berbagai permasalahan dalam distribusi beras. Kami telah mengambil langkah tegas untuk memastikan serapan gabah berjalan sesuai aturan. Jika diperlukan, maka kami siap melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan petani," tuturnya.

Salah satu fokus utama pengawasan Polri adalah memastikan penggilingan padi skala besar menyerap 20% gabah petani sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Namun, hingga saat ini, target tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan dorongan agar semua pihak berkomitmen menjalankan aturan.

"Kami akan memastikan para pemilik penggilingan besar berkomitmen untuk menyerap gabah petani dan menyesuaikan harga sesuai dengan HPP. Ini adalah bagian dari dukungan kami

terhadap kebijakan Presiden terkait swasembada pangan sebagai pilar utama bangsa," ujarnya.

Selain menjaga kepentingan petani, Polri juga memperhatikan keseimbangan harga di tingkat konsumen. Komjen Wahyu menekankan, kebijakan ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan ketimpangan harga yang dapat merugikan salah satu pihak.

"Ada dua sisi yang harus kita jaga. Jika harga terlalu murah, petani akan kesulitan. Namun, jika terlalu tinggi, konsumen yang dirugikan. Kita harus memastikan keseimbangan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tuturnya.

Wahyu menyoroti masalah rantai distribusi beras yang masih terlalu panjang akibat dominasi perantara dan penggilingan padi berskala besar. Hal ini menyebabkan harga tidak stabil dan menyulitkan petani dalam menjual hasil panennya dengan harga yang layak.

"Kami terus melakukan pemantauan melalui Satgas Pangan untuk memastikan distribusi beras berjalan dengan baik. Ini adalah bagian dari marwah pemerintah dan bukti kehadiran negara dalam melindungi petani serta menjaga stabilitas pangan nasional," tegasnya.

Sebagai putra seorang petani yang pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian, Wahyu mengaku memiliki perhatian khusus terhadap isu ketahanan pangan. Karena itu dirinya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan. "Ke depan, kami berharap Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan yang lebih kuat. Pada prinsipnya, Polri siap mendukung kebijakan pemerintah," ujarnya. **Yul**

Strategi Pemerintah Kontrol Harga Komoditi Pertanian Stabil dan Menguntungkan Bagi Petani

(Bagian II)

Oleh:

Muhammad Syahri Mubarak, SST., M.P.
Penyuluh Pertanian di BPSIP Jawa Tengah

Dalam menciptakan kestabilan harga komoditas pertanian yang layak, stabil dan menguntungkan bagi petani, pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan mengimplementasikan beberapa strategi yang terencana, terstruktur, terintegrasi dan tepat sasaran, agar dapat mengontrol dan mengendalikan harga komoditas pertanian mulai dari tingkat petani sampai pasar.

Pengelolaan Pangkalan Cadangan Pangan Nasional

Dengan adanya pangkalan cadangan pangan ditingkat desa, pemerintah dapat mengintervensi dan mengendalikan pasar ditingkat desa ketika harga komoditas pertanian melambung tinggi akibat krisis dan kelangkaan pasokan hasil pertanian.

Melalui pengelolaan pangkalan cadangan pangan yang baik dan terkontrol, pemerintah dapat memasok kebutuhan pasar antar daerah ketika pasokan komoditas pertanian terbatas di daerah tertentu, sehingga dapat menahan laju lonjakan harga yang berlebihan. Pangkalan cadangan pangan juga dapat digunakan sebagai alat mengontrol dan menjaga stabilitas harga komoditas pertanian selama musim-musim tertentu.

Kebijakan Pengendalian Harga Dasar dan Maksimal

Penetapan kebijakan harga dasar dan maksimal untuk beberapa komoditas, seperti beras, jagung, kedelai, sayuran dan buah tertentu sebagai acuan harga jual ditingkat petani agar tidak jauh dibawah biaya produksi yang dikeluarkan. Adanya penetapan harga dasar dan maksimal dari pemerintah dapat melindungi petani dari penurunan harga yang drastis yang tidak menguntungkan serta memberikan rasa aman kepada petani.

Kebijakan tersebut juga dapat mengintervensi pasar agar harga terkendali dan fleksibel dengan memperhatikan kondisi pasokan

dan permintaan, serta dapat menciptakan adanya kepastian harga bagi petani dan mencegah adanya gejolak pasar.

Namun, kebijakan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Penetapan harga yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar akan menciptakan distorsi, seperti munculnya pasar gelap atau adanya penumpukan stok yang tidak terkendali.

Karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap mekanisme pasar, biaya produksi, dan daya beli masyarakat dalam menetapkan kebijakan harga. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan intervensi pasar dengan membeli hasil panen petani ketika harga jatuh dan menjualnya kembali ketika harga naik.

Pembangunan dan Penguatan Sistem Infrastruktur Distribusi yang Efisien

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi petani di lapangan dan menjadi penyebab inflasi adalah ketidakseimbangan distribusi komoditas pertanian dari daerah penghasil ke pasar. Infrastruktur yang buruk dan rantai pasok distribusi komoditas pertanian yang tidak efisien dan terlalu panjang sering menjadi penyebab melonjaknya harga jual komoditas pertanian di pasar.

Pemerintah perlu meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas penyimpanan (cold storage), seperti pembangunan jalan yang lebih baik dari daerah sentra kawasan pertanian sampai ke pasar, dan penyediaan fasilitas cold storage disentra kawasan pertanian, serta kawasan pasar yang dikelola secara terstruktur antar daerah.

Kebijakan ini juga dapat membantu menekan fluktuasi harga, mengurangi biaya distribusi dan

memastikan bahwa harga tetap stabil dan terjangkau, serta meningkatkan margin keuntungan petani.

Kemudahan Akses terhadap Informasi Harga Pasar yang Akurat dan Realtime

Pemerintah dapat memfasilitasi petani untuk mengakses harga pasar yang akurat dan realtime secara langsung. Informasi tersebut sangatlah penting bagi petani untuk menyeimbangkan posisi tawar petani dalam rantai pasok pasar. Petani juga tidak lagi bergantung pada tengkulak dan dapat menikmati harga jual yang lebih baik.

Adanya, kemudahan akses terhadap informasi harga pasar yang akurat dan realtime juga dapat membantu para petani mengetahui harga yang berlaku antar pasar di daerah lain. Sehingga, mereka dapat memilih dan menyesuaikan nilai harga jual hasil pertaniannya dengan pasar yang ada.

Pemberdayaan Koperasi dan Kelembagaan Petani

Melalui wadah kelembagaan, petani dapat mengorganisir diri dan memasarkan hasil pertanian mereka secara kolektif, yang memungkinkan mereka memperoleh harga jual yang lebih baik dan kompetitif. Koperasi juga dapat membantu petani dalam pembelian dan pengadaan sarana produksi dengan harga yang lebih murah dan kompetitif. Adanya pemberdayaan dan penguatan koperasi petani yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan nilai tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok dan memperbesar daya tawar di pasar.

Diversifikasi Usahatani

Pemerintah perlu mendukung penerapan diversifikasi usahatani pada suatu lahan pertanian agar dapat meningkatkan pendapatan petani. Misalnya, dengan mendorong petani mengembangkan dan menanam berbagai jenis komoditas pertanian yang memiliki permintaan pasar stabil, tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas.



Sistem Pangan



Oleh: **Memed Gunawan**

Kita belum tuntas menangani masalah pangan. Tidak hanya ketersediaan, kecukupan dan kualitas, tetapi keseimbangan asupan gizi dan pola konsumsi berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Indeks Ketahanan Pangan masih belum aman, tingkat konsumsi protein masih rendah, bahkan konsumsi sayuran, buah dan ikan tergolong jauh dari memadai walaupun ketersediaan sayuran, buah dan ikan melimpah. Jadi persoalannya bukan hanya kuantitas tetapi kualitas dan pola konsumsi masyarakat.

Rata-rata IQ juga rendah padahal teknologi masa depan semakin memerlukan SDM yang cerdas, trampil dan mempunyai kemampuan daya pikir yang mumpuni. Kebijakan dan program ketahanan pangan adalah bagian dari penyiapan SDM masa depan. Pada tahun 2025, kebijakan pangan fokus untuk mencapai swasembada dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Perluasan areal pertanian,

intensifikasi dan kebijakan harga sedang dilaksanakan.

Program Makanan Bernutrisi Gratis (MBG) merupakan program besar senilai \$28 miliar untuk menyediakan makanan gratis dan bergizi bagi hampir 90 juta anak dan ibu hamil. Inisiatif ini bertujuan mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang menimpa 21,5% anak-anak di Indonesia, serta meningkatkan pendapatan petani lokal.

Pengembangan "Food Estate" dan Modernisasi Pertanian juga merupakan bagian dari upaya mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan. "Food Estate" dikembangkan melalui peningkatan infrastruktur pertanian, dan modernisasi sektor agribisnis. Targetnya adalah menambah luas panen hingga 4 juta hektare pada tahun 2029. Brigade pangan dibentuk untuk mengerahkan tenaga muda dan berpengalaman menangani daerah pertanian bukaan baru dalam skala luas.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun

pada tahun 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dana ini akan digunakan untuk berbagai program strategis guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan menghindari sejauh mungkin impor diterapkan, kecuali pada kasus tertentu, contohnya mengantisipasi harga gula pasir meningkat menjelang Ramadan, Indonesia berencana mengimpor sekitar 200.000 ton gula mentah sebagai cadangan pangan pemerintah.

Penetapan HPP dilakukan dengan memberikan jaminan kepada petani memperoleh harga yang layak dan stabil. HPP ditetapkan sebesar Rp 6500 per kg, pupuk dan benih dijanjikan akan didukung pemerintah dengan subsidi besar.

Pada jajaran pemerintah telah dilakukan penataan dan pergeseran kepemimpinan kelembagaan terkait, khususnya Bulog. Penyuluhan ditarik ke Pusat dan pengaturan peran penyuluh di lapangan diupayakan

diselesaikan dalam waktu secepatnya.

Dalam menangani masalah pangan, yang dibangun adalah sistem pangan, mulai dari hulu, produksi, distribusi sampai konsumsi yang efisien dengan alokasi imbalan yang adil. Pada sektor produksi petanilah yang mengoperasikan kegiatan produksi di lapangan. Mereka butuh dukungan pelatihan, penyuluhan, kemudahan dan kelembagaan yang kuat. Maka diperlukan peningkatan kapasitas petani, penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani agar punya posisi tawar yang sejajar dengan sektor lain. Inilah kondisi paling lemah yang dihadapi dalam pertanian kita yang perlu mendapat perhatian serius. Tetap optimis.

Masuk Polbangtan dan PEPI, Jangan Takut Tidak Bekerja

Di tengah persaingan dunia kerja, pendidikan menjadi sangat penting. Untuk memberikan kesempatan kepada anak petani dan penyuluh pertanian mendapatkan pendidikan tinggi, Kementerian Pertanian membuka peluang kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia (PEPI). Bahkan mahasiswa yang kuliah di sekolah vokasi tersebut akan menerima beasiswa penuh.

Polbangtan sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STPP). Namun pada tahun 2018 berubah menjadi Polbangtan di enam lokasi. Saat ini Kementerian Pertanian mempunyai enam Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta-Magelang (YOMA), Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa dan Polbangtan Manokwari. Namun pada tahun 2020 berdiri PEPI yang berada di Tangerang Selatan.

"Kami membuka seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama lulusan SMA, SMK dan sederajat lainnya terkait pendaftaran di sekolah vokasi Kementerian Pertanian," kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti saat jumpa pers Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Polbangtan dan PEPI di Jakarta, Senin (17/2).

Banyak Pilihan Program Studi

Ada beberapa pilihan dan jurusan di Polbangtan dan PEPI. Misalnya, di Polbangtan Medan ada program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Perkebunan Presisi dan Teknologi Produksi Perkebunan. "Bahkan ada peminatan kopi. Sekolah kopi ini kita terus tingkatkan dari mulai budidaya, olahan kopi dan barista," ujarnya.

Sementara di Polbangtan Bogor ada program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Agribisnis Hortikultura dan Teknologi Mekanisasi Pertanian dan Kesehatan Hewan. Selain itu, ada peminatan sekolah smart farming. "Di Polbangtan Bogor banyak green house hasil kerjasama dengan mitra. Ada juga peminatan medik veteriner yang merupakan satu-satunya di Polbangtan. Banyak peminatan lainnya," tuturnya.

Adapun di Polbangtan YOMA, selain penyuluhan ada beberapa peminatan lainnya seperti teknologi benih, agribisnis hortikultura, teknologi pakan ternak dan teknologi produksi ternak. Begitu juga di Polbangtan Malang, selain penyuluhan pertanian dan peternakan, ada juga agribisnis peternakan, khususnya mengelola ternak potong, ayam, sapi dan kambing potong.



Di Polbangtan Gowa, selain program studi penyuluhan pertanian dan penyuluhan peternak dan kesehatan, ada juga program studi budidaya hortikultura dan ternak. "Di sana juga ada peminatan sekolah kakao. Bahkan sudah ada hulu hilir, baik perbenihan, usaha tani maupun pabrik mini cokelat, bahkan sudah ada cafe-nya," katanya.

Sementara di Polbangtan Manokwari, program studinya penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan dan teknologi produksi tanaman perkebunan. Bahkan ada peminatan tanaman rempah. Untuk PEPI ada program studi teknologi mekanisasi pertanian, teknologi hasil pertanian dan tata air pertanian. "Intinya di PEPI ini kita akan melahirkan teknisi alsintan yang saat ini dibutuhkan di perusahaan dan petani," katanya.

Santi berharap, lulusan Polbangtan dan PEPI ini mencetak jobseeker yakni penyuluh pertanian. Apalagi ada rencana pemerintah menginginkan ke depan satu desa, satu penyuluh. Saat ini jumlah penyuluh hanya 37.600, padahal kebutuhan sebanyak 80.000 penyuluh pertanian.

Selain itu juga lulusan Polbangtan dan PEPI menjadi seorang jobcreator atau wirausaha muda pertanian. Diharapkan mereka nanti bisa menjadi petani milenial dalam Brigade Pangan yang mengelola usaha pertanian modern dari hulu hingga hilir. "Jangan khawatir bagi yang ingin bergabung dalam Polbangtan dan PEPI tidak bisa mendapatkan pekerjaan," katanya.

Tahapa PMB

Kapan waktu pendaftaran? Santi menjelaskan, pendaftaran sekolah

vokasi melalui beberapa jalur. Untuk jalur undangan dimulai dari 17 Februari-21 Maret 2025, khususnya untuk SMK-PP dan kerjasama, dan seleksi masuk untuk anak petani dan penyuluh pertanian.

"Jadi kita mengutamakan adik-adik kita yang berasal dari keluarga petani dan penyuluh. Nanti saat pendaftaran, jangan lupa menunjukkan KTP orang tuanya. Dengan demikian kita bisa mempertimbangkan adik-adik anak petani dan penyuluh bisa masuk Polbangtan dan PEPI," tuturnya.

Untuk jalur umum ini akan dibuka dimulai pada 21 April sampai 25 Mei 2025. Sedangkan jalur prestasi akan buka pada 1-13 Juli 2025. Jalur prestasi ini bisa dari anak-anak yang berprestasi di olah raga, hafidz Quran, Ketua OSIS dan memiliki kegiatan usaha yang sudah berhasil.

Selain skema yang sudah ada selama ini, Santi menjelaskan, Polbangtan dan PEPI juga sudah membuka pendaftaran skema khusus untuk mahasiswa asing, karena telah memiliki program dan metari pembelajaran program mahasiswa internasional. Saat ini di PEPI ada 15 orang yang bergabung.

"Kami juga membuka jalur tugas belajar, paling tinggi usia 25 tahun. Ini untuk PNS. Sedangkan dari daerah 3 T dapat sekolah dengan usia 37 tahun dengan melampirkan perjanjian surat tugas belajar," katanya.

Polbangtan dan PEPI juga membuka PMB melalui jalur RPL (Recognisi Pembelajaran Lampau). Jalur ini dibuka khusus untuk penyuluh yang ingin meningkatkan jenjang karirnya karena hanya memiliki ijazah SMA/SMK. "Dengan sekolah lagi, nanti mereka bisa menjadi lulusan D3 atau D4 dengan



mengakuisisi pengalaman yang sudah bertahun-tahun menjadi penyuluh itu selama 2 tahun. Jadi penyuluh tinggal menambah 2 tahun lagi untuk menempuh pendidikan di Polbangtan dan PEPI," tuturnya.

Selain melalui jalur-jalur tersebut, Santi menjelaskan, Pusdiktan juga membuka jalur kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN dan dunia usaha lainnya. Nantinya diperlukan Nota Kesepahaman agar mahasiswa yang melalui jalur tersebut mendapat kepastian bekerja dari daerah asalnya atau perusahaan yang telah mengirimnya untuk belajar, baik sebagai jobseeker maupun jobcreator.

"Meski adik-adik kita nanti mendapatkan beasiswa dari pemerintah, tapi kami sangat mengharapkan adanya sharing cost atau dukungan pembiayaan dari mitra kerjasama tersebut, misalnya 50 persen," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Muhammad Amin mengatakan, ada beberapa tahapan seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru, yakni meliputi penilaian administrasi akademik, kemudian uji kompetensi dasar dengan menggunakan CAT dan materi lain seperti matematika, bahasa Inggris, teknik pertanian.

Setelah tahapan tersebut akan dilakukan wawancara untuk menggali potensi, minat dan bakat peserta yang akan masuk. Tidak kalah penting, adalah tes kesehatan agar mahasiswa yang belajar di Polbangtan dan PEPI bisa mengikuti kegiatan dengan baik hingga mereka lulus.

Proses seleksi tersebut diberlakukan secara umum yang dilakukan masing-masing Polbangtan dan PEPI dengan kendali dari panitia PMB yang secara nasional. "Untuk anak-anak petani, kami berharap ketika mereka lulus kuliah bisa kembali untuk membangun desanya," ujarnya. **Yul**

Dari Iseng, Poktan Amanah jadi Rujukan Bertani Hidroponik

Siapa sangka, berawal sekadar mencari kesibukan di tengah pandemi justru mengantarkan sekelompok warga di Bekasi pada kesuksesan bertani hidroponik. Berawal dari kebun kecil di lahan fasum, Kelompok Tani (Poktan) Amanah kini berkembang menjadi pemasok sayur hidroponik bagi salah satu Bank BUMN dan resmi bertransformasi menjadi koperasi



Kelompok Tani (Poktan) Amanah yang berlokasi di Perum Griya Prima Galaxy 2, RT 008 RW 003, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, telah mengalami perjalanan panjang sejak didirikan pada 2019. Berawal dari inisiatif warga yang mencari aktivitas produktif di tengah pandemi COVID-19, kelompok ini kini berkembang pesat.

Ketika pandemi melanda, banyak warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau harus bekerja dari rumah (WFH). Untuk mengisi waktu luang, mereka mulai bertani hidroponik dengan bimbingan seorang pelaku usaha hidroponik yang memiliki visi mengajak masyarakat bertani modern.

"Kebetulan saya punya teman yang sudah lebih dulu menekuni hidroponik. Kemudian, kami mengajak warga untuk mencoba bertani dengan metode ini. Kami belajar mulai dari menyemai, membuat instalasi, hingga meracik nutrisi," ungkap Bendahara Poktan Amanah,

Rachmad Saputra, atau yang akrab disapa Putra.

Dengan memanfaatkan lahan fasilitas umum (fasum), mereka menanam berbagai jenis sayuran hidroponik. Hasil panen awalnya hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi seiring waktu, mereka mulai menjualnya ke warga sekitar. Antusiasme semakin meningkat ketika Poktan Amanah mendapat kesempatan memasok sayuran hidroponik ke salah satu Bank BUMN pada tahun 2020.

Dalam kemitraan ini, Poktan Amanah mulai dari skala kecil dengan hanya 50 pot tanaman. Namun, permintaan terus bertambah hingga mencapai 120 pot. Seiring waktu, jumlah tanaman yang dipasok terus meningkat. Pengiriman di minggu pertama awal bulan mencapai 540 pot, kemudian bertambah menjadi 870 pot di minggu kedua. Siklus ini terus berulang setiap bulan.

Menariknya, sayuran hidroponik yang berusia 2 dan 3 minggu ditanam langsung di instalasi khusus yang

sudah dipersiapkan dalam gedung bank BUMN tersebut. "Di lantai pertama ditanam sayuran yang bisa dipanen dalam waktu satu minggu, sementara di lantai lain ditanam sayuran dengan masa panen dua minggu, sehingga setiap minggu selalu ada hasil panen," tutur Putra.

Untuk memastikan kualitas, sayuran yang dikirim harus memenuhi kriteria ketat, seperti bebas hama, tidak menguning, dan dipanen pada usia yang tepat. Beberapa jenis sayuran yang rutin dikirim adalah pokcoy, bayam hijau, bayam batik, dan kangkung.

Prestasi dan Pengakuan

Keberhasilan Poktan Amanah tidak hanya dalam aspek bisnis tetapi juga dalam kompetisi. Baru tiga bulan setelah berdiri, mereka diikutsertakan dalam lomba pertanian tingkat Kota Bekasi oleh penyuluh pertanian lapangan yang membina mereka. Meski baru pertama kali berpartisipasi, Poktan Amanah berhasil meraih juara harapan 1.

Tahun berikutnya, mereka kembali mengikuti lomba dan berhasil merebut peringkat pertama. Salah satu faktornya adalah kekompakan warga.

Selain memasok ke salah satu Bank BUMN, Poktan Amanah juga memiliki tim pemasaran yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu warga sekitar. Mereka menjual sayuran segar dengan rata-rata penjualan mencapai 3 kg per hari. "Untuk sayuran segar yang paling banyak diminati adalah bayam hijau" ungkap Putra.

Poktan Amanah juga menerapkan sistem mandiri. Setiap anggota kelompok membeli peralatan hidroponik seperti benih, rockwool, dan nutrisi dari Poktan Amanah. Sebagai gantinya, hasil panen mereka dibeli kembali oleh Poktan Amanah untuk dijual ke pasar yang

lebih luas.

Poktan Amanah juga berkontribusi dalam menambah kas RT. Warga yang ingin bertani hidroponik tetapi terkendala biaya dapat dibantu dengan sistem cicilan. Instalasi akan dibuat terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan dengan cara memotong hasil penjualan sayuran mereka.

Namun, kendala utama yang sering dihadapi adalah ketika musim hujan. "Karena belum ada grand house di area fasum warga, sehingga nutrisi yang ada di tandon utama menjadi terbuang sia-sia. Dan itu menyebabkan pengeluaran cukup besar untuk pembelian nutrisi" kata Putra.

Transformasi menjadi Koperasi

Pada akhir 2024, Poktan Amanah resmi berbadan hukum sebagai koperasi. Dengan status baru ini, mereka mulai merancang langkah strategis untuk mengembangkan koperasi, termasuk kemungkinan ekspansi ke bidang niaga dan sektor lainnya.

Keberhasilan mereka menarik perhatian banyak pihak. Mahasiswa, kelompok tani lain, dan instansi pemerintah sering berkunjung untuk belajar bagaimana Poktan Amanah bisa bertahan dan berkembang meski para anggotanya memiliki kesibukan lain.

"Kami juga sering mengirim bibit sayur hidroponik ke sekolah dan kantor untuk ditanam kembali di sana. Bahkan, kadang kami memberikan materi pelatihan hidroponik kepada siswa sekolah," tambah Putra.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Poktan Amanah terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi warga serta lingkungan sekitar. Dari sekadar aktivitas di masa pandemi, kini mereka telah menjadi contoh sukses dalam bertani hidroponik yang berkelanjutan dan profesional. **Herman**





Optimis, Produksi Padi Meningkatkan

Ketahanan pangan nasional saat ini sangat terjaga. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras awal tahun 2025 diperkirakan meningkat signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah menjaga stok pangan dengan target penyerapan gabah oleh Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras optimis bisa tercapai.

Berbagai upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mengungkit produksi pangan, khususnya padi, mulai membuah hasil. Terlihat dari hasil KSA BPS yang mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta ha. Angka ini menunjukkan kenaikan luas panen sekitar 970.330 ha atau 52,08 persen dibandingkan luas panen pada Januari–Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta ha.

Dampak kenaikan produksi padi tersebut terlihat pada rata-rata harga beras di tingkat petani, penggilingan, grosir, dan eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 turun sebesar 4,30% dibandingkan tahun sebelumnya. "Harga beras ini turun 4,30% secara tahunan alias year on year (yoy)," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Menteri Pertanian, Andi

Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari upaya sinergis berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Bahkan pencapaian ini sebagai bukti nyata efektivitas berbagai program strategis yang pemerintah jalankan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Amran menegaskan, keberhasilan ini dicapai melalui implementasi berbagai program unggulan seperti optimasi lahan rawa, pompanisasi, perluasan areal tanam, serta mekanisasi pertanian. Peningkatan produksi juga tidak terlepas dari perbaikan infrastruktur irigasi, ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai, serta implementasi teknologi pertanian modern yang lebih efisien.

"Program-program ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani, sehingga berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan ketersediaan beras nasional," katanya.

Amran menjelaskan, pompanisasi merupakan salah satu program andalan yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui program ini, Kementerian Pertanian memfasilitasi penggunaan pompa air untuk mengatasi keterbatasan

irigasi, khususnya di lahan-lahan tadah hujan dan daerah yang mengalami kekeringan. Dengan sistem pompanisasi, petani dapat mengairi lahan mereka secara lebih efektif, meningkatkan indeks pertanaman, dan memperluas masa tanam sepanjang tahun.

"Kami optimis, dengan dukungan penuh Bapak Presiden Prabowo, berbagai pihak terkait dan kebijakan yang tepat, Indonesia mampu mencapai swasembada pangan secepatnya dan menghentikan impor beras selamanya di masa mendatang," tambahnya.

Dampak ke Petani

Dengan peningkatan produksi padi yang cukup signifikan ini, Amran berharap dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Bukan hanya dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik, tapi juga meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada awal tahun ini, BPS mencatat, nilai tukar petani (NTP) mencapai 123,68 pada Januari 2025. NTP ini meningkat 0,73% dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 122,78. Komoditas yang mempengaruhi harga yang diterima petani adalah cabai rawit,

cabai merah, kakao atau coklat biji, dan gabah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono mengatakan, produksi pangan Indonesia tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, berbanding terbalik dibanding kondisi banyak negara yang saat ini justru mengalami krisis pangan.

Baru-baru ini, Filipina bahkan resmi mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan akibat lonjakan harga beras yang tak terkontrol. Langkah ini diambil untuk mengendalikan kenaikan harga yang semakin membebani masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan ketergantungan pada impor.

Untuk menjamin ketahanan pangan nasional terus terjaga, Kementan pun meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah petani selama panen raya. Sebagai upaya mendukung penyerapan gabah, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran Rp16,6 triliun untuk Bulog dengan target menyerap 3 juta ton setara beras hingga April 2025.

Selain dukungan anggaran, Kementan juga telah memfasilitasi kesepakatan antara Bulog dan industri penggilingan padi untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari petani. "Produksi padi meningkat di hulu, dan Bulog punya peran kunci untuk menyerap gabah petani. Kami yakin Bulog bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga stok beras nasional tahun ini tetap aman," tutur Arief.

Humas Tanaman Pangan

Hadi Irpandi Pasok Benih Padi Unggul Seantero Pasaman

Dieraserba digital, banyak anak muda berbondong-bondong meninggalkan desa demi mengejar mimpi di kota. Namun, Hadi Irpandi memilih jalur berbeda.

Petani milenial asal Kabupaten Pasaman ini membuktikan bahwa tanah sawah yang sering dianggap "ketinggalan zaman" bisa menjadi tambang emas jika dikelola dengan cerdas. Dengan inovasi dan semangat, ia sukses menangkarkan benih padi unggul yang kini banyak diburu petani.

Lahir dan besar di Petok, Nagari Panti Selatan, Hadi akrab dengan dunia pertanian sejak kecil. Namun, titik baliknya terjadi setelah menyelesaikan kuliah di jurusan Agroteknologi, Universitas Taman Siswa Padang, pada 2019.

Alih-alih mencari pekerjaan di kota, ia memilih kembali ke kampung halaman dan membangun usaha berbasis pertanian.

Di Pasaman, banyak petani masih bergantung pada benih yang kurang berkualitas. Hadi melihat celah ini sebagai peluang besar.

Dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah, ia mulai menangkarkan benih padi unggul, memastikan semua prosesnya diawasi oleh

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Sumatera Barat.

Produsen Benih

Kerja kerasnya terbayar pada 22 Februari 2022, saat ia mendapatkan sertifikasi sebagai produsen benih unggul dengan merek "Multi Jaya."

Kini, ia mampu menghasilkan hingga 10 ton benih unggul per musim, terbagi antara varietas Cisokan dan Inpari Zinc.

Menurut Hadi, menjual benih unggul jauh lebih menguntungkan dibandingkan menjual gabah biasa. "Bedanya bisa signifikan. Dengan menangkarkan benih, keuntungan naik drastis, sedangkan biaya produksinya hanya bertambah sedikit," ujarnya.

Tambahan biaya hanya sekitar Rp 300 ribu per hektare untuk proses "roughing" atau penyortiran tanaman yang tidak memenuhi standar.

Hadi tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga strategi pemasaran yang inovatif. Ia memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar, mulai dari Facebook, Instagram, hingga

WhatsApp Business.

Dengan cara ini, ia bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan luar Sumatera Barat.

Selain pemasaran digital, Hadi juga menjalin kerja sama dengan kelompok tani dan koperasi di wilayahnya.

Ia aktif mengikuti pameran pertanian dan bazar benih untuk memperkenalkan produk "Multi Jaya" ke pasar yang lebih luas.

Tak ingin terpaku pada satu sektor, Hadi juga merambah bidang lain. Ia memproduksi pupuk organik dengan merek "Golden," berbahan dasar kotoran sapi yang dicampur Trichoderma.

Dengan harga Rp 40 ribu per karung, pupuk ini menjadi pilihan banyak petani yang ingin beralih ke metode pertanian organik.

Selain itu, ia juga menjual bibit unggul seperti kopi, cabai, cokelat, dan berbagai tanaman hortikultura. Dengan cara ini, ia memastikan pertanian Pasaman tidak hanya bertumpu pada satu komoditas, melainkan berkembang lebih luas.

Ajak Anak Muda

Hadi tak hanya berorientasi pada bisnis. Ia juga ingin mengubah cara pandang generasi muda tentang pertanian. "Bertani itu keren! Kalau dikelola dengan baik, hasilnya bisa lebih menguntungkan dari pekerjaan kantor," tegasnya.

Tak hanya berbicara, ia bergerak nyata. Bersama teman-temannya,



ia membentuk komunitas "Petani Milenial Pasaman," yang kini memiliki 15 anggota aktif.

Mereka fokus pada berbagai aspek pertanian, dari penangkaran benih hingga hortikultura. Data dari Dinas Pertanian Pasaman tahun 2022 mencatat ada 435 petani milenial di daerah itu. Jika 10% saja mengikuti jejak Hadi, Pasaman bisa menjadi pusat penyedia benih unggul nasional.

Hadi berharap pemerintah lebih aktif mendukung petani milenial. Penyuluhan, akses modal, dan pendampingan teknis sangat dibutuhkan agar usaha pertanian semakin berkembang.

"Pertanian itu tulang punggung negeri ini. Kalau sektor ini maju, ekonomi daerah juga ikut terdongkrak," katanya.

Kisah Hadi Irpandi adalah bukti bahwa bertani bukan hanya pekerjaan tradisional, melainkan bisa menjadi bisnis modern yang menguntungkan.

Sekarang, tinggal menunggu lebih banyak anak muda yang berani melangkah seperti Hadi, membawa pertanian Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. **Nattasya**

AGRITIPS

Cara Mengolah Durian yang Mudah dan Lezat

Durian, dikenal dengan rasa manis dan tekstur lembutnya yang khas, memang menjadi favorit banyak orang.

Namun, banyak yang masih bingung bagaimana cara mengolah durian dengan benar agar bisa menikmati lezatnya tanpa ribet.

Berikut beberapa tips mengolah durian yang mudah dan lezat!

Sebelum mengolah durian, pastikan kamu memilih durian yang matang. Caranya, pilih durian dengan bau yang harum dan sedikit terbuka di bagian kulitnya. Cobalah ketuk kulitnya, jika suara yang keluar agak nyaring, itu tanda durian sudah matang.

Buka durian dengan hati-hati agar tidak terluka. Gunakan pisau tajam atau alat pembuka durian. Potong kulit durian di sekitar duri dan buka dengan perlahan. Jangan lupa untuk hati-hati agar daging durian tidak terbuang.

Kamu bisa langsung menikmati daging durian segar begitu dibuka. Buang bijinya, dan sajikan dagingnya di mangkuk. Nikmati tekstur lembut dan manisnya durian yang segar.

Jika kamu ingin mencoba sesuatu yang berbeda, durian bisa dijadikan bahan dasar smoothie. Cukup campurkan daging durian



dengan susu, es batu, dan sedikit gula. Blender hingga halus, dan kamu akan mendapatkan smoothie durian yang creamy dan menyegarkan!

Untuk sensasi baru, coba goreng durian. Potong daging durian menjadi potongan kecil, celupkan ke dalam adonan tepung, lalu goreng hingga garing. Atau, kamu bisa membuat pancake durian dengan memasukkan durian yang sudah dihaluskan ke dalam adonan pancake.

Dengan cara-cara tersebut, durian tak hanya bisa dinikmati secara langsung, tapi juga bisa dijadikan hidangan kreatif yang menggugah selera. Selamat mencoba! **Nattasya/Gsh**

PUPUK ORGANIK CAIR

EM4
EFFECTIVE MICROORGANISMS 4

EM
EMRO

HEMAT BIAYA
PANEN BERLIPAT
GANDA

TEKNOLOGI FERMENTASI
BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fixasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.

L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Kadar Hara Pupuk
 C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
 N = 0,07 % ; P₂O₅ = 3,22 ppm;
 K₂O = 7675,0 ppm; Ca = 1676,25;
 Mg = 597,0 ppm; B < 20 ppm;
 Cu < 0,01 ppm; Mn = 3,29 ppm;
 Fe = 5,54 ppm; Zn = 1,90 ppm;

Mikroba:
 Lactobacillus = 8,7 x 10⁵ sel/ml;
 Pelarut Fosfat = 7,5 x 10⁶ sel/ml;
 Yeast/Khamir = 8,5 x 10⁶ sel/ml;

Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

KANTOR PEMASARAN :
JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
 E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH : Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjateng@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR : Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail: slpjtatim@em4-indonesia.com
BALI : Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

Web: www.em4-indonesia.com
 Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

Keluarga Besar Tabloid Sinar Tani Mengucapkan
Selamat Atas Dilantikannya
Pejabat Lingkup Kementerian Pertanian

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.	SEBAGAI	KEPALA BIRO HUKUM
ETA RUKMALASARI AGUSTINA, S.P., M.M.A., M.SC.	SEBAGAI	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
DR. ANDY WIJANARKO, S.P., M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR PEMETAAN LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
ANDI HERINDRA RAHMAWAN., S.I.K., S.H., M.H.	SEBAGAI	DIREKTUR PELINDUNGAN DAN OPTIMASI LAHAN
GELORIA MERRY KAROLINA BR. GINTING, S.P., M.M., M.SC.	SEBAGAI	DIREKTUR PENYEDIAAN LAHAN
ASMARHANSYAH, S.P., M.SC., PH.D.	SEBAGAI	DIREKTUR KONSERVASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR PERTANIAN
MUHAMMAD RIZAL ISMAIL, S.P., M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR ALAT DAN MESIN PASCAPANEN
HANDI ARIEF, S.T., M.A.P.	SEBAGAI	DIREKTUR PESTISIDA
IR. BAGINDA SIAGIAN, M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR TANAMAN SEMUSIM DAN TAHUNAN
HARIS DARMAWAN, S.E., M.SC.	SEBAGAI	DIREKTUR HILIRISASI HASIL PERKEBUNAN
DR. DRH. PURWANTA, M.KES.	SEBAGAI	KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
INDRIA FITRIANI, S.H., M.AP.	SEBAGAI	KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
IR. NURWAHIDA, M.SI.	SEBAGAI	KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
DRH. MOCHAMMAD ARIEF CAHYONO, M.SI.	SEBAGAI	KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
DR. FAUSIAH T. LADJA, S.P., M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR ALAT DAN MESIN PRAPANEN
DR. DRS. JEKVY HENDRA, M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR PUPUK
DHANI GARTINA, S.KOM., M.T.	SEBAGAI	DIREKTUR IRIGASI PERTANIAN
DR. RACHMAT, S.SI., M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
MULYONO, S.P., M.M.	SEBAGAI	DIREKTUR HILIRISASI HASIL TANAMAN PANGAN
IR. HENDRATMOJO BAGUS HUDORO, M.SC.	SEBAGAI	DIREKTUR PELINDUNGAN PERKEBUNAN
MUHAMMAD SIDIQ, S.TP., M.M.	SEBAGAI	DIREKTUR PELINDUNGAN HORTIKULTURA
HOTMAN FAJAR SIMANJUNTAK, S.T., M.M.	SEBAGAI	DIREKTUR HILIRISASI HASIL HORTIKULTURA
DRH. MAKMUN, M.SC.	SEBAGAI	DIREKTUR HILIRISASI HASIL PETERNAKAN
DR. SETYA BUDHI UDRAYANA, S.PT., M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR POLBANGTAN MALANG
DR. NURLIANA HARAHAP, S.P., M.SI.	SEBAGAI	DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN
R. HERMAWAN, S.P., M.P.	SEBAGAI	DIREKTUR POLBANGTAN YOGYA MAGELANG



Ayam Maron, Produktivitas Tinggi dengan Keunggulan Khas Ayam Kampung

Di tengah dominasi ayam ras dalam industri perunggasan, inovasi baru hadir untuk meningkatkan daya saing ayam kampung. Ayam Kampung Unggul Maron (AKU MARON), hasil pengembangan Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu (BBPTT) Jawa Tengah, menawarkan produktivitas tinggi dengan keunggulan khas ayam kampung.

Urahan peningkatan produktivitas dan kemanfaatan ayam lokal telah dilakukan Balai Penelitian Ternak yang menyeleksi ayam lokal. Hasilnya, didapatkan ayam lokal dengan hasil awal bertelur umur 20-21 minggu, produksi telur 200 butir/ekor/tahun atau rata-rata produksi 75%, sifat mengeram tinggal 5%. Ayam yang dinamakan Janaka Agrinak ini telah dilepas Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan No.768/Kpts/PK.020/M/12/2021.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga mencoba mengembangkan ayam lokal unggul. Lokasinya di instalasi pembibitan di Taman Ternak Ayam Lokal Maron, Temanggung.

Salah satu ayam lokal yang dikembangkan adalah ayam Kedu, ayam Lingnan dan ayam Sembawa. Ayam-ayam tersebut masing-

masing memiliki kelebihan, tapi ada juga kelemahan yang menjadi faktor penghambat dalam proses produksi.

Misalnya ayam Kedu memiliki kualitas daging yang baik khas ayam lokal, namun memiliki sifat mengeram dan pertumbuhan lambat. Sedangkan ayam Lingnan memiliki pertumbuhan yang cepat, tapi kualitas dagingnya kurang disukai karena berwarna putih. Sementara ayam Sembawa memiliki produksi telur tinggi dan tidak mengeram, namun corak warna bulunya kurang disukai pasar, serta posturnya kecil dan pertumbuhan lambat.

Salah satu upaya meningkatkan produktivitas melalui crossbreeding atau persilangan dengan menggabungkan beberapa sifat baik dari ayam lokal tersebut. Harapannya agar memperoleh keturunan lebih unggul dari tetuanya. Melihat berbagai kelebihan dari ayam kampung tersebut, Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Jawa Tengah dilakukan persilangan

ayam lokal.

Upaya persilangan diawali dengan pemuliaan pada tatanan pureline tetua yang akan disilangkan. Tujuan akhir *crossbreeding* adalah ingin menghasilkan ayam dengan produksi telur tinggi, sedikit sifat mengeram, warna kerabang, telur putih krem dan memiliki sifat pertumbuhan yang cepat.

Dari tetua ayam Sembawa dan ayam Lingnan Maron dihasilkan galur Ayam Maron-1 tipe petelur. Saat ini juga telah dihasilkan Ayam Maron-2 yang merupakan ayam pedaging. Persilangan kedua ayam tersebut dilakukan di Taman Ternak Ayam Maron dengan sistem *close breeding* sejak tahun 2019 dengan menerapkan prinsip seleksi dan *culling*.

Penuhi Kebutuhan Pasar

Menurut Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Ignatius Hariyanta Nugraha, M.Si., inovasi ayam Maron adalah langkah besar dalam meningkatkan produksi ayam lokal. "Ayam Maron dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menginginkan ayam kampung dengan pertumbuhan lebih cepat dan produksi telur lebih banyak, tetapi tetap memiliki cita rasa khas," tuturnya.

Saat ini peneliti BBPTT Jateng telah berhasil menciptakan dua varian unggulan ayam kampung Maron yaitu Maron-1 (tipe petelur). Keunggulannya, produksi telur mencapai 220 butir per tahun. Puncak produksi hingga 85 persen dengan rata-rata 60 persen dan telur berwarna putih krem, sesuai dengan preferensi pasar.

Lalu ada Maron-2 (tipe pedaging) dengan keunggulan dapat dipanen dalam 70-90 hari dengan bobot 900-1.300 gram. Selain itu, memiliki tekstur daging khas ayam kampung, lebih padat dan gurih.

Pengawas Bibit Ternak Madya BBPTT Jateng, Rahayu Kusumaningrum menjelaskan, ayam Maron dikembangkan melalui teknik

seleksi genetik dari beberapa jenis ayam lokal unggulan, seperti Kedu Merah, Kedu Putih, Lingnan Maron, dan Sembawa. "Kami menerapkan teknik pemurnian dan persilangan untuk menghasilkan ayam dengan pertumbuhan optimal, daya tahan tinggi terhadap iklim tropis, dan tetap mempertahankan kualitas khas ayam kampung," jelasnya.

Sejak pertama kali diperkenalkan, ayam Maron mendapat respons positif dari para peternak. Produksi bibit ayam DOC (*Day Old Chick*) terus meningkat dari 14.199 ekor pada 2020 menjadi 61.053 ekor pada 2021, atau naik 429,98%.

Saat ini, produksi DOC ayam Maron telah mencapai 65.000-80.000 ekor per tahun. Kini ayam Maron telah tersebar ke berbagai daerah seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Subang, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bali, Pontianak, Makassar, dan Lampung.

Meski prospeknya cerah, pengembangan ayam kampung unggul seperti Maron masih menghadapi tantangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan bahwa produksi daging ayam ras nasional mencapai 4,2 juta ton, sedangkan ayam kampung hanya berkontribusi 6,56% atau 280.725 ton.

Untuk itu, BBPTT Jateng terus berupaya meningkatkan kualitas ayam Maron melalui seleksi genetik berbasis DNA molekuler dan penelitian pakan alternatif guna menekan biaya produksi. "Kami optimis ayam Maron bisa menjadi solusi bagi peternak lokal. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik, ayam ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan, baik untuk skala rumahan maupun komersial," pungkas Hariyanta.

Dengan inovasi ini, ayam kampung tidak lagi hanya menjadi pilihan eksklusif, tetapi bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Jika pengembangannya terus berlanjut, ayam Maron berpotensi menjadi tulang punggung perunggasan lokal yang mampu bersaing dengan ayam ras. **Djoko W/Herman**



Kolagen Gelatin Halal Pertama Diperkenalkan

Lembaga Wakaf Nurul Taqwa (LWNT) PT Indosat dan PT Geltech Prima Indonesia, bekerja sama dengan IPB University, meluncurkan Collagel, produk kolagen gelatin halal pertama yang diproduksi di Indonesia. Produk ini melibatkan pakar IPB University, Prof Tun Tedja Irawadi dari Halal Science Center dan Prof Mala Nurilmala dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).

Acara peluncuran berlangsung di Auditorium Lt 4 Gedung Indosat, Kantor Indosat, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat (15/2). Rektor IPB University, Prof Arif Satria berharap produk ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri dalam negeri, mengingat hampir 100 persen kolagen gelatin saat ini masih diimpor. "Upaya ini merupakan terobosan dalam pengembangan inovasi bidang perikanan, khususnya blue food menjadi terhilirisasi dan komersialisasi, sehingga dapat memberikan impact ekonomi secara nasional," ucapnya.

Collagen dibuat berbahan dasar ikan berkualitas tinggi dan terjamin kehalalannya. Prof. Mala Nurilmala mengatakan, kolagen dan gelatin merupakan salah satu

bahan baku atau bahan tambahan penting berbagai sektor industri. Misalnya, bahan baku pengemulsi, pengental, penstabil, pembentuk gel dan pengingat air. Gelatin bisa menjadi bahan baku kosmetik seperti untuk pelembab dan anti keriput. Sedangkan untuk industri farmasi bisa untuk kapsul keras dan lunak.

Saat ini ungkap Mala, penggunaan kolagen terus meningkat. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri masih banyak dari impor. Sedangkan sumber bahan baku komposional lebih banyak dari kulit dan tulang babi yang persentasenya hampir 50 persen, kemudian sapi dan yang lain sangat sedikit.

"Dengan bahan baku dari babi menimbulkan kekhawatiran bagi kaum muslim. Sedangkan sumber bahan baku dari kulit sapi impor juga



hingga kini belum jelas kehalalannya. Karena itu, menjadi penting kolagen dari sumber lain," tuturnya.

Sebagai Guru Besar yang banyak berkecimpung dalam teknologi hasil perikanan, Mala mencoba mengembangkan kolagen gelatin dari produk perikanan. Hal ini untuk menjawab persoalan kehalalan bahan baku kolagen untuk industri dalam negeri.

Mala mengungkapkan, Indonesia mempunyai banyak sumber ikan yang komersial, tapi penggunaan bahan hasil samping belum optimal. Selama ini hasil samping ikan hanya dalam bentuk kerupuk, kemudian sisik dan tulang juga dibuang. "Kami mencoba memanfaatkan produk samping ikan, seperti kulit atau sisik dan gelembung ikan untuk dijadikan sumber kolagen gelatin," kata Angkatan 28 IPB tersebut.

Mala melihat, potensi kolagen gelatin ikan cukup tinggi. Di kulit ikan mencapai 80 persen. Berbeda dengan sapi yang ada di Indonesia, pemanfaatan tulang dan kulit akan

bersaing dengan kebutuhan pangan, khususnya menu rumah makan.

Karena itu ia optimis produk kolagen gelatin ikan bisa menjadi alternatif, bahkan menjadi peluang baru memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Alasannya, potensinya sangat besar, hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Potensi sumberdaya perikanan juga tinggi dan industri perikanan terus berkembang.

Perwakilan PT Geltech Prima Indonesia, Raden Radya mengungkapkan, selain produk kolagen untuk industri pangan, kosmetik, farmasi, dan kesehatan, ada juga produk kolagen siap konsumsi berbentuk liquigel dengan varian plain, mint, jahe, dan jeruk.

"Alhamdulillah dari uji coba, masyarakat merasakan manfaatnya di antaranya untuk kesehatan dan perbaikan sendi, kesehatan kulit, antiaging, antioksidan, deep sleep, kesehatan pencernaan, bahkan menunjang keharmonisan hubungan pasangan suami istri," kata dia. **Yul**

Komersialisasi E-PAPER SinarTani

SinarTani

Tabloid
sinartani.com

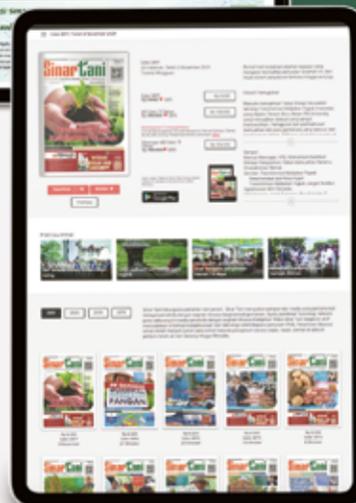
SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersial dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

Jelang Ramadan, Pemerintah Siapkan Operasi Pasar

Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Salah satu langkah utama adalah menggelar operasi pasar di berbagai daerah guna menekan potensi lonjakan harga pangan.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harapkan harga bahan pokok stabil, bila perlu harganya lebih rendah daripada tahun sebelumnya," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sekaligus selaku Menko Pangan Ad Interim saat memimpin Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok bersama kementerian, lembaga, dan BUMN Pangan, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (17/2).

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar, termasuk rencana volume komoditas yang didistribusikan, penentuan harga berbagai komoditas

pada operasi pasar, hingga penentuan lokasi pelaksanaan operasi pasar. "Kita akan melakukan operasi pasar besar, khususnya komoditas daging, gula pasir, minyak goreng, dan seterusnya. Hari ini kita masih rapatkan dan keputusan terakhir itu pada 19 Februari 2025," ungkapnya.

Amran menambahkan, pemerintah akan cermat dalam menentukan harga komoditas pada operasi pasar ataupun harga eceran tertinggi (HET) komoditas secara umum yang akan diumumkan pada 19 Februari 2025 nanti. "Tugas kita sebagai regulator dan pengatur kebijakan, bagaimana produsen dalam hal ini petani dan peternak tersenyum, konsumen bahagia, dan pengusaha tetap untung," ujarnya.

Mentan Amran juga memastikan ketersediaan bahan pokok yang mencukupi jelang Ramadan. "Beras aman, itu yang paling penting, beras aman karena ini kontribusinya kepada inflasi. Daging, bawang, insya Allah kita aman, stok aman. Intinya stok kita siapkan sekarang,



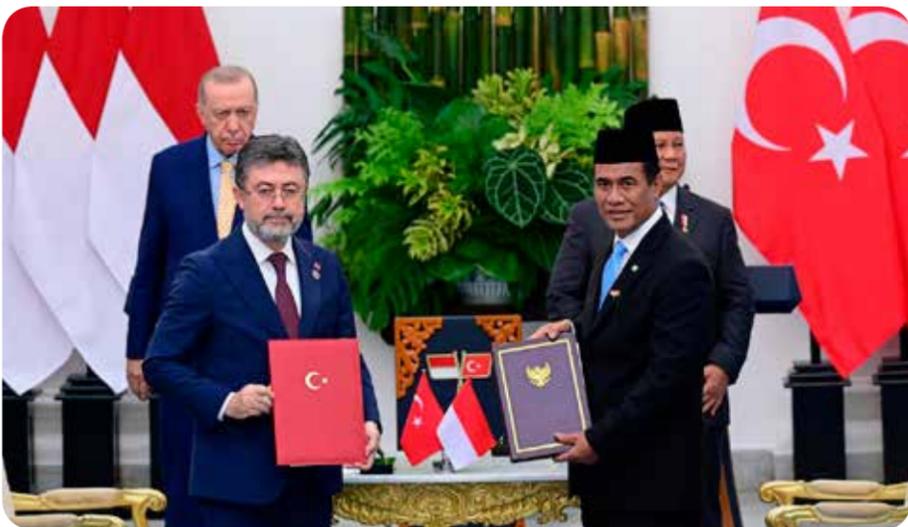
kita sudah pantau, kita sudah rapat koordinasi tadi, stok aman, jumlahnya cukup," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menambahkan akan memberikan dukungan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan. Salah satunya, koordinasi dengan Dinas Perdagangan agar kegiatan operasi pasar menjangkau lapisan

masyarakat di daerah.

"Atas arahan Bapak Menteri Pertanian, kami akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan PD Pasar, terutama di daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan turun operasi pasar di sana dengan komoditas yang sudah ditentukan dan juga dengan titik-titik yang telah ditentukan berdasarkan laporan," jelasnya. **Yul**

RI-Turki Sepakat Kerjasama Ekspor Pertanian



Pemerintah Indonesia dan Turki resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian. Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pertanian dan Kehutanan Republik Turki, İbrahim Yumaklı, sebagai langkah strategis mendorong ekspor berbagai komoditas pertanian unggulan kedua negara.

Melalui MoU ini, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di berbagai sektor pertanian, termasuk produksi tanaman, perlindungan tanaman, peternakan, kesehatan hewan, serta pengolahan pangan dan pakan. Komoditas yang menjadi fokus kerja sama ekspor meliputi kopi, kelapa sawit, karet, rempah-rempah (lada, pala, dan kayu manis), teh, kakao, buah tropis (mangga,

nanas, dan pisang), serta produk peternakan seperti unggas dan daging olahan dari Indonesia.

Sementara itu, gandum menjadi salah satu komoditas utama yang akan diekspor dari Turki ke Indonesia untuk mendukung kebutuhan pangan nasional. Selain mendorong ekspor, kerja sama ini juga mencakup pengembangan teknologi pertanian, pertukaran informasi, pelatihan teknis, penelitian bersama, serta penerapan pertanian cerdas berbasis digital (smart agriculture).

Kedua negara juga sepakat membentuk Komite Pengarah untuk memantau pelaksanaan kerja sama secara efektif dan berkelanjutan. "Kerja sama ini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor komoditas pertanian Indonesia ke Turki, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar internasional terhadap produk-produk pertanian berkualitas dari Indonesia," ujar Amran. **Yul**

ICOPE 2025: Perkuat Posisi Tawar Indonesia

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengajak para pelaku usaha dan pengembang kelapa sawit di dunia untuk meningkatkan produktivitasnya demi memperkuat ketahanan pangan dan mendukung pengembangan sumber energi berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono di sela pembukaan Konferensi Internasional Kelapa Sawit dan Lingkungan atau International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) 2025 yang berlangsung di Bali, Rabu (12/2)

Sektor perkebunan dan industri kelapa sawit menurut Mas Dar, sapaan akrab Wamentan, memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Bahkan peran industri sawit begitu strategis, sehingga dengan meningkatkan produktivitas akan menguatkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci sawit global.

Karena itu ia melihat pentingnya penelitian untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki target besar dalam mengembangkan biofuel berbasis kelapa sawit, seperti B14, B15, dan saat ini terus berinovasi dalam pengembangan biofuel dengan target B40.

"Ini adalah langkah pemerintah Indonesia untuk menjadikan kelapa sawit sebagai bahan multifungsi yang mendukung ketahanan energi dan ekonomi. Apalagi, lebih dari 60 persen minyak dunia dipasok dari sawit Indonesia," tuturnya. **Yul**



Budi Santoso, Sulap Sekam jadi *Pengawet Alami*



Dulu cuma jadi limbah, kini sekam padi naik kasta. Inovasi cerdas mengubahnya menjadi pengawet alami yang ramah lingkungan. Bukan cuma solusi sehat, tapi juga ladang cuan yang bikin untung melimpah.



juga merasakan manfaat besar dari produk ini. Dengan merendam sayuran dalam air yang telah dicampur dengan *liquid smoke*, sayuran yang ia jual lebih segar dan lebih tahan lama. "Dampaknya yang jelas, konsumen lebih percaya dengan produk yang kami tawarkan karena lebih segar dan awet," ujarnya.

Pupuk Alami

Tidak hanya untuk industri pangan, Budi juga menciptakan pupuk alami berbahan dasar sekam padi yang dapat menstabilkan pH tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Bagi petani, penggunaan pupuk alami ini terbukti meningkatkan produktivitas pertanian serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Saat ini, Budi masih menjual produk *liquid smoke* dan pupuk alami secara perorangan. Namun, meskipun belum memasarkan produknya secara luas, omset yang dihasilkan sudah mencapai Rp 5-10 juta per bulan dengan harga Rp 80 ribu per botol.

Ia optimis produk ini memiliki potensi yang sangat besar di pasar. Budi berharap produk-produk pengawet alami dan pupuk yang ia buat bisa digunakan secara lebih luas, sehingga tidak hanya membantu petani dan pelaku industri pangan, tetapi juga memberikan dampak positif pada kualitas pangan yang ada di Indonesia.

"Bagi saya, ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah misi untuk membuat produk pangan di Indonesia lebih aman untuk dikonsumsi. Kita ingin agar makanan yang sampai ke konsumen tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Saya yakin, kalau kita berani memulai dan percaya pada apa yang kita kerjakan, pasti bisa," ujar Budi penuh keyakinan.

Produk *liquid smoke* ini membuktikan, meski usaha ini tergolong baru, peluang pasar untuk produk ini terus berkembang. Mulai dari pengawet alami untuk bahan pangan, hingga manfaat lainnya di sektor pertanian dan industri lainnya.

Seiring dengan larangan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin, pasar *liquid smoke* semakin terbuka lebar, dan produk-produk inovatif ini semakin dilirik oleh berbagai kalangan. *Liquid smoke* menunjukkan potensi besar untuk berkembang. **Gsh**

Budi Santoso mungkin terdengar seperti nama orang biasa. Namun, siapa sangka pria ini berhasil mengubah limbah pertanian menjadi solusi yang luar biasa untuk masalah lingkungan dan pangan.

Di tengah banyaknya limbah yang dibakar sembarangan dan penggunaan bahan kimia dalam pangan, Budi melihat peluang untuk memberikan perubahan. Ia berani mengubahnya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkungan dan masyarakat Indonesia.

Budi Santoso tinggal di kawasan yang penuh dengan aktivitas pertanian, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti banyak daerah lainnya, asap limbah pertanian yang dihasilkan dari pembakaran sekam padi sering mencemari udara dan menimbulkan bau tak sedap.

Tidak hanya itu, limbah ini juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar yang harus menghirup asapnya setiap hari. Keprihatinan terhadap kondisi lingkungan ini mendorong Budi untuk mencari solusi.

Namun, tidak berhenti sampai situ. Budi juga merasa prihatin dengan kondisi pangan di Indonesia yang sering kali mengandung bahan pengawet kimia berbahaya. Padahal di sisi lain, ia melihat pertanian Indonesia mulai menghadapi penurunan produktivitas tanah yang kian menurun akibat penggunaan pupuk kimia.

Kondisi itu semakin membuat Budi berpikir keras, bagaimana cara

memanfaatkan limbah yang ada untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengan semangat untuk mencari solusi atas dua masalah besar tersebut, Budi mulai berpikir tentang bagaimana limbah pertanian, terutama sekam padi agar bisa lebih berguna.

Setelah banyak percakapan, riset, dan mencoba berbagai eksperimen, ide untuk mengubah sekam padi menjadi pengawet alami akhirnya muncul. "Bahan baku kami ambil dari limbah pertanian, khususnya sekam padi. Kami bakar menggunakan alat yang kami rancang sendiri," ungkap Budi.

Pembakaran sekam padi tersebut menghasilkan *liquid smoke* yang kaya akan senyawa pengawet alami. Ternyata menurut Budi, cairan ini bisa untuk berbagai keperluan, baik itu untuk industri, pangan, maupun pertanian.

Meski terdengar sederhana, proses penciptaan alat untuk menghasilkan cairan *smoke liquid* tersebut bukanlah hal yang mudah. Budi harus mendesain alat dengan sangat sederhana, murah, namun tetap bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tinggi.

Melalui kerja keras dan eksperimen tanpa henti, Budi akhirnya berhasil menemukan cara yang efektif untuk memproduksi *liquid smoke* dari sekam padi. *Liquid smoke* yang dihasilkan Budi tidak hanya memberikan manfaat untuk lingkungan, tetapi juga bagi berbagai sektor. Salah satunya adalah industri pangan.

Dalam pembuatan asap cair

tersebut, hitungan Budi dengan membakar tiga karung sekam yang masing-masing berisi 20 kg selama 24 jam bisa menghasilkan 8 liter asap cair. Asap cair yang diperoleh dari proses ini mempunyai warna hitam pekat karena terdapat kandungan tar.

Untuk menghilangkan kandungan tar tersebut, asap cair akan didiamkan kurang lebih 48 jam kemudian dilakukan proses penyaringan menggunakan kertas saring. Hasil saringan tersebut kemudian dimurnikan kembali melalui proses pemurnian yang disebut destilasi dengan suhu 1.200 derajat Celsius untuk menghasilkan asap cair yang murni. Asap cair sudah diuji di Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu UGM.

Sebagai pengawet alami, produk ini mampu memperpanjang umur simpan bahan pangan tanpa perlu menggunakan bahan kimia berbahaya. Contohnya Sri Lestari, seorang pengusaha ikan gurame krispi.

Ia pernah mengalami kerugian besar ketika pesanan ikan gurame sebanyak 100 kg membusuk sebelum sempat diproses. Namun, setelah menggunakan cairan *smoke liquid* ini, ikan yang disimpan lebih tahan lama dan kualitasnya tetap terjaga. Dengan pengawet alami ini, Sri merasa lebih percaya diri menjalankan bisnisnya karena produk yang dijual tetap segar dan aman untuk dikonsumsi.

Selain itu, Simu Tri Mufaid, seorang pemasok sayuran untuk hotel dan restoran di Yogyakarta,